

KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN

Kurikulum pendidikan selalu berubah ubah dari tahun ke tahun, karena banyaknya permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam kondisi bangsa Indonesia, mulai dari zaman orde lama, orde baru, dan sampai sekarang zaman reformasi. Di setiap provinsi di Indonesia tentu ada Madrasah Diniyah. Seperti halnya di provinsi Kalimantan Selatan Madrasah Diniyah sudah berjalan dengan baik. Dalam pembuatan buku referensi ini penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah



Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. lahir di Desa Rumpiang Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Maret 1966. Penulis aktif mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tinggal di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani III RT. 30 No. 16 Banjarmasin Kalimantan Selatan, E-mail: husnulyaqin@uin-antasari.ac.id

KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH
DI KALIMANTAN SELATAN



Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.

KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN

Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.



Penerbit: Radja Publitte
Pengarang: Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.
Editor: Dr. Hj. Salamah, M.Pd.
Tahun: 2021
ISBN: 978-623-98634-4
Website: www.prisa.radjapublitte.com
Email: radjapublitte@gmail.com



**KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI
KALIMANTAN SELATAN**

Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.



KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN

ISBN: 978-623-98634-9-4

Hak Cipta pada Penulis

Penulis:

Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.

Editor:

Dr. Hj. Salamah M.Pd.

Layout & Desain

Usman Jayadi

Penerbit:

RADJA PUBLIKA

SARAN DAN MASUKAN UNTUK PROSES PERBAIKAN

E-mail: penerbitkakapress@gmail.com

©2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All right reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENERBIT CV. RADJA PUBLIKA

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana, Kelurahan Hagu Barat Laut, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Telp./WA: 082151240436

Email: radjapublika@gmail.com Laman: www.radjapublika.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan karunia yang tak terhingga dalam pembuatan buku referensi ini dengan judul “Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan”.

Kurikulum pendidikan selalu berubah ubah dari tahun ke tahun, karena banyaknya permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam kondisi bangsa Indonesia, mulai dari zaman orde lama, orde baru, dan sampai sekarang zaman reformasi. Di setiap provinsi di Indonesia tentu ada Madrasah Diniyah. Seperti halnya di provinsi Kalimantan Selatan Madrasah Diniyah sudah berjalan dengan baik. Dalam pembuatan buku referensi ini penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah.

Pada dasarnya, buku ini dibuat dari hasil penelitian dalam konteks laporan hasil penelitian Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan. Buku ini meneliti madrasah diniyah di 4 daerah di Kalimantan Selatan, yaitu

Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kami sadar bahwa buku referensi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berhadapan kepada pembaca dapat memberikan kritik dan saran agar ke depannya bisa lebih baik lagi di dalam penulisan sebuah buku. Terimakasih.

Desember 2020

Penulis,

Dr. H. Husnul Yaqin, M. Ed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Metode Penelitian	10
BAB 2 KONSEP DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM	15
A. Pengertian Kurikulum	15
B. Komponen Kurikulum	23
C. Kurikulum Pendidikan Islam	27
D. Model Konsep Pengembangan Kurikulum	29
E. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam	30
F. Unsur-Unsur Pendidikan Islam	32
BAB 3 KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH	37
A. Konsep Kurikulum Berbasis Madrasah	37
B. Landasan Pengembangan Kurikulum	39
C. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum	45

D. Teori Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah	50
E. Keterlibatan Personil	54
F. Kelebihan dan Kekurangan Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah	56

BAB 4 PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

Pemilihan Model Pengembangan	59
B. Analisis Situasi dan Kebutuhan	67
C. Penemuan Aims, Goals dan Objectives	70
D. Merumuskan Isi Kurikulum	74
E. Seleksi Metode-Metode Kurikulum	76
F. Evaluasi Kurikulum	78
G. Implementasi Kurikulum	82
H. Umpan Balik dari Perubahan Kurikulum	83
I. Peran Orang Tua/Wali dan Masyarakat	86

BAB 5 PENGEMBANGAN KARAKTER MADRASAH

A. Madrasah	93
B. Pengembangan Ciri Khas Madrasah	107
C. Pengembangan Pada Bidang Keagamaan	107
D. Pengembangan Ciri Khas Madrasah Unggul	111

BAB 6 PERANAN KELUARGA, SEKOLAH/MADRASAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Peranan Keluarga dalam Efektivitas Pembelajaran	116
B. Kolaborasi Antara Sekolah/Madrasah dan Keluarga	120
C. Hubungan Masyarakat dan Sekolah/Madrasah	123

BAB 7 PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

	140
A. Kegiatan Guru Merencanakan Kurikulum	140
B. Kegiatan Guru Melaksanakan Kurikulum	143
C. Kegiatan Guru Menilai Kurikulum	144

BAB 8 KURIKULUM MADRASAH DINIYAH DI KALIMANTAN

SELATAN	147
A. Kurikulum Madrasah Diniyah Jenjang Awwaliyah	147
B. Kelompok Mata Pelajaran Pendidikan Islam Jenjang Awwaliyah	151
C. Kelompok Mata Pelajaran Bahasa Arab Jenjang Awwaliyah	156
D. Kelompok Mata Pelajaran Penunjang Jenjang Awwaliyah	157
E. Kurikulum Madrasah Diniyah Jenjang Wustha	158
F. Kelompok Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Jenjang Wustha	159

G. Kelompok Madrasah Bahasa Arab Jenjang Wustha	162
BAB 9 Penutup	167
DAFTAR PUSTAKA	169
BIOGRAFI PENULIS	177

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah Diniyah dikenal juga dengan diksi dan bentuk lain, yaitu pengajian anak-anak, sekolah agama, sekolah kitab, sekolah sore, dan lain-lain. Bentuk legal penamaan Madrasah Diniyah secara formal tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964 tentang pengertian, fungsi, dan tujuan Madrasah Diniyah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 03 tahun 1983 tentang kurikulum Madrasah Diniyah dan juga dalam kurikulum Madrasah Diniyah Wustho tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 2007 muncul peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang berisi rincian dari pertimbangan pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dalam rangka

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Adapun dalam PP RI No. 55 tahun 2007 terdapat pada pasal 25 tentang Madrasah Diniyah, dan secara konkret disebutkan juga dalam PP tersebut bahwa pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal. Revisi konkret tentang Madrasah Diniyah diafirmasi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Dalam PMA ini dijelaskan bentuk pendidikan diniyah yang terbagi menjadi pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah non formal, dan pendidikan diniyah informal. Hal ini menjadi *affirmatif action* bahwa Madrasah Diniyah dalam eksistensinya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagai bagian dari lembaga Pendidikan Islam, Madrasah Diniyah merupakan salah satu alternatif wadah arahan kepada pertumbuhan dan perkembangan generasi muslim kepada titik *optimal ability* untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, apalagi di dalam era reformasi dan arus globalisasi di mana masyarakat bersifat dinamis yang juga tak luput dari terpaan materialis dan

hedonis. Sangat perlu adanya *vehicle* belajar agama yang di sini adalah Madrasah Diniyah dengan kekhasannya untuk menjadi konstruksi idea mencukupi pemahaman Islam karena memang pendidikan di Madrasah Diniyah bagi orang tua merupakan salah satu bentuk manifestasi kebutuhan akan adanya pendidikan agama yang di sekolah umum dirasa belum cukup.

Madrasah Diniyah adalah sebagai penyempurna dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia santri pada jenjang pendidikan dasar yang secara fungsional maupun substansial berada di bawah pengendalian Kementerian Agama dari pusat hingga ke daerah dan Madrasah Diniyah secara khittahnya adalah bentuk nyata pendidikan Islam yang memiliki cita-cita tentang hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus (anak-anak), sehingga keilmuan dan nilai-nilai Islam yang menjadi idea tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari masa ke masa, dan dari generasi ke generasi. Pertumbuhan yang pesat akan eksistensi Madrasah Diniyah ini terlihat dari banyaknya jumlah Madrasah Diniyah di Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan Selatan saja terdapat 469 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 50.900 santri, yang tersebar di

Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Secara konkret berdasarkan data dokumen dari Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam tahun 2017/2018 disebutkan bahwa untuk kota Banjarmasin memiliki 14 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 1.804 orang, Kabupaten Batola memiliki 120 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 8.206 orang, Kota Banjar Baru memiliki 14 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 621 orang, Kabupaten Banjar memiliki 33 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri terbanyak se-provinsi kalsel yaitu 21.853 orang santri, Kabupaten Tapin memiliki 52 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 338 orang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 21 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 2.203 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 48 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 3.512 orang, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 21 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 1.502 orang, Kabuptaen Balangan memiliki 16 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 696 orang, Kabupaten Tabalong memiliki 12 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 843 orang, Kabupaten Tanah Laut memiliki 61 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 5.427 orang, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 10 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 914 orang, dan Kabupaten Kotabaru

memiliki 47 Madrasah Diniyah dengan jumlah santri 2.981 orang. Kenyataan eksistensi Madrasah Diniyah yang menjamur ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Transformasi paradigma pendidikan Islam harus mampu memperkuat penyelenggaraan Madrasah Diniyah, baik dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Namun, prinsip pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah ini belum optimal dalam praksisnya. Fokus pendidikan pada kemampuan ritual dan keyakinan tauhid harus didukung dengan anggaran dan intensitas pembinaan yang dilakukan maupun profesionalisme ketenagaan dan kelembagaan, dan tentu perubahan birokrasi kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia sudah seharusnya mendukung terhadap pembinaan Madrasah Diniyah. Kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang harus lebih banyak lagi disosialisasikan dan dipopulerkan dalam lingkup Madrasah Diniyah, terlebih Madrasah Diniyah yang berada di pedesaan ataupun daerah terpencil. Realitas sumber daya pendidikan yang minim juga sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena jika belum terakomodir, maka realitas rendahnya kualitas hasil pendidikan dan jaminan kelangsungan hidup menjadi momok persoalan

selanjutnya dalam lingkup Madrasah Diniyah. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pemetaan deskripsi bagaimana Madrasah Diniyah itu sesungguhnya, sehingga bias menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemerhati Pendidikan Islam dalam memberikan kontribusi nyata untuk Madrasah Diniyah. Selain itu juga, diskursus tentang Madrasah ataupun Madrasah Diniyah khususnya dalam lingkup Kalimantan Selatan belum banyak yang mengkaji. Pembahasan mengenai pertumbuhan dan narasi lembaga pendidikan Islam di kalangan muslim masih sedikit, sehingga perlu dideskripsikan sebagai bentuk argumentasi konstruktif persoalan Madrasah Diniyah di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna mendeskripsikan dan menganalisis Madrasah Diniyah di Kalimantan secara komprehensif dan mendalam sehingga dari hasil penelitian akan melihat secara konkret dan menyeluruh tentang potret Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi rekomendasi dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan pada khususnya, dan lembaga pendidikan Islam secara general. Madrasah

Diniyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang di luar pesantren, sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam konteks ini fokus perhatian ditujukan kepada masalah kurikulum Madrasah Diniyah yang menjadi muatan penting dari suatu proses Pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan memiliki inti yaitu interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk berusaha membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan (Syaodih Sukmadinata, 2017: 1). Namun, menurut Syahidin (2009; 2) pendidikan tidak hanya merupakan transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik melainkan juga merupakan suatu proses dalam pembentukan karakter peserta didik. Maka dari itu pendidikan bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan-perubahan untuk beradaptasi dengan ruang dan waktu serta karakter menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan global (Muhammad Irsad, 2016; 231). Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya dengan tujuan yakni memperbaiki pendidikan itu sendiri dengan cara menambahkan konsep yang bersifat

dan mempertahankan kebaikan pada konsep yang lama (Muhammad Irsad, 2016; 232).

Menurut Muhammad Irsad (2016; 233) jika perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, maka perubahan itu pun tidak dapat diarahkan hanya kepada sebagian sub pendidikan saja, melainkan mengarah kepada seluruh aspek pendidikan, dalam hal ini tidak terkecuali kepada kurikulum sebagai sebuah kerangka program dalam melaksanakan sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang ada dimana pun. Tanpa adanya kurikulum sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang direncanakannya. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam mensukseskan program belajar mengajar, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan terutama para pendidik atau guru (Silahuddin, 2014: 333-334). Selama ini kita mengenal kurikulum sebagai sebuah alat yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan saja. Namun, jika kita mengkaji lebih jauh lagi kurikulum memiliki sebuah konsep yang sangat kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki arti sebagai sesuatu yang

hidup dan berlaku dalam jangka waktu tertentu dan perlu perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman (Silahuddin, 2014: 333). Di Indonesia kurikulum sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Dalam catatan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 (dengan nama Kurikulum Rencana Pelajaran), 1952 (dengan nama Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai), 1964 (dengan nama Kurikulum Rencana Pendidikan), 1968, 1975, 1984, 1994, (yang masing-masing menggunakan tahun sebagai nama kurikulum), 2004 (dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi), 2006 (dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan yang terbaru adalah kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan K-13 (Muhammad Irsad, 2016; 233). Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk memaparkan tentang kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang tersebut penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data tidak berbentuk angka yang diperoleh melalui rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Penelitian kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data populasi dan sampel yang mana data populasi secara keseluruhan terdapat 469 lembaga Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan dengan rincian dan sampel diambil berdasarkan sistem zona, seperti Hulu Sungai (Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong) diambil 1 kabupaten, kemudian zona Pelaihari (Pelaihari, Tanah Bumbu, Kotabaru) diambil 1 kabupaten, zona Batola (Barito Kuala) di ambil 1 kabupaten, dan zona Banjar (Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru) di ambil 1 kabupaten. Dari tiap zona diambil 4 madrasah Diniyah Awwaliyah secara random dengan dasar kabupaten /kota tersebut memiliki banyak jumlah santri, dan 4 Madrasah

Diniyah Wustha di Kabupaten yang ada jenjang wusthanya.

NO	NSDT	NAMA MADRASAH DINIYAH	ALAMAT
ZONA BATOLA			
1	311263040110	Majaligus Saniyah (Awwaliyah)	Jl. Panglima Batur RT 04 Marabahan
2	311263040113	Al Ma'arif Baiturrahim (Awwaliyah)	Jl. Aes Nasution Marabahan
3	311263040070	Raudlatul Ulum (Awwaliyah)	Desa Belawang RT. 07 No.1 Belawang Kab. Barito Kuala
4	311263040007	Subulussalam (Awwaliyah)	Sei. Telan Kecil Tabunganen, Kab. Barito Kuala
ZONA BANJAR			
1	311263030102	Nurul Hikmah (Awwaliyah)	Jl. Mentari Empat Keraton Martapura
2	311263030301	Darul Aman (Awwaliyah)	Jl. A. Yani Km. 43,5 Tambak Anyar Ilir Martapura Timur Kab. Banjar
3	311263030002	Al Khairiah (Awwaliyah)	Jl. Mesjid Jami Da'watul Haq Pinggiran Ilir Astambul Kab. Banjar
4	321263030195	Miftahul Huda (Awwaliyah)	Jl. Barakat RT. 01 Ds. Pulau Nyiur Karang Intan Kab. Banjar
WUSTHA			
1	321263030005	Izharussalam (Wustha)	Keliling Benteng Ulu Martapura Barat Martapura
2	321263030169	Darul Aman (Wustha)	Jl. A. Yani Km. 43,5 Tambak Anyar Ilir Martapura Timur Kab. Banjar

3	321263030008	Fita'limissibyan (Wustha)	Desa Lokbaintan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
4	321263030175	Qul Hadzihi Sabili (WUSTHA)	Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh
ZONA KABUPATEN TANAH LAUT (PELAIHARI)			
1	311263010033	Nurul Huda	Jl. Buran Desa Kait-Kait Baru Rt 10 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Pelaihari
	311263010028	Bustanul Ulum	Jl Sabar Menanti Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Pelaihari
3	31126310016	Al Falah	Desa Penjaratan Kecil Kecamatan Pelaihari Kabupaten Pelaihari
4	311263010006	Miftahul Falah	Jl Pendidikan N0 099 Desa Kandangan Lama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Pelaihari
ZONA HULU SUNGAI TENGAH (HST)			
1	311263070016	Al Qamar	Barabai Pasar
2	311263070004	Damanhuru	Desa Ganggu Berabai Utara
3	3112630070011	Al Hidayah	Desa Kayu Rabah Kec Pandan Kabupaten HST
4	311263070051	Al-Ghaniy	Kias Berabai Selatan

Objek penelitian ini adalah Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan dengan focus pada kurikulum Madrasah Diniyah. Adapun penelitian ini diperoleh datanya dari kepala Madrasah Diniyah, dewan

guru/ustadz/ustadzah, personalia dan masyarakat di sekitar Madrasah Diniyah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan pola Bogdan dan Biklen yakni menelaah data, memilah ke dalam satuan-satuan atau memberi kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola, berusaha menemukan sesuatu yang penting dan unik dan setelahnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data.

BAB 2

KONSEP DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum adalah suatu kegiatan pendidikan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut pandangan yang lampau kurikulum memiliki pengertian kumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik (Syaodih Sukmadinata, 2017: 4). Anggapan tersebut masih mengakar dalam benak masyarakat umum yang

menjadikan gambaran kurikulum. Kurikulum yang menjadi jantungnya pendidikan (Arifin, 2018: 58) tentunya harus dikenal dengan benar oleh masyarakat tentang konsepnya yang sebenarnya. Pandangan lain dari kurikulum menurut al-Shaybani yang dikutip oleh Hasan Langgulung (1985; 145) kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga, serta ilmu kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dengan tujuan mengembangkan secara menyeluruh dalam semua aspek dan merubah tingkah laku sesuai tujuan pendidikan.

Kurikulum menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (Arifin, 2018: 59). Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani (Huda Rohmadi, 2012: 9) yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu (Idi, 2007: 183). Dalam Bahasa latin *curriculum* berarti *a running, course, or race course*, kemudian dalam Bahasa Prancis *courir* yang memiliki arti berlari. Dari beberapa pengertian bahasa latin tersebut kemudian

digunakan istilah “courses” atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar (Nasution, 2003: 9).

Secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli (Nurmadiyah, 2018: 43). Di antaranya :

- 1) Menurut Crow kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematis guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah.
- 2) Menurut Arifin kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.
- 3) Menurut Syaodih Sukmadinata (2017) kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar-mengajar.
- 4) Menurut definisi yang dikemukakan oleh Doll (1974; 22) kurikulum memiliki pengertian yang luas tidak hanya sekedar memuat pengertian berkaitan dengan proses belajar saja, melainkan memberikan

perubahan lingkup yang memuat pengalaman belajar anak di lingkungan.

- 5) Menurut Mauritz Johnson (1967; 130) pendapat dari Doll tersebut disanggah dengan alasan bahwa pengalaman hanya akan muncul ketika adanya interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Interaksi bukan merupakan kurikulum melainkan pengajaran. Dalam penjelasannya Johnson menegaskan bahwa pengajaran memuat perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.

Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, kurikulum yang awalnya dipandang sebagai kumpulan dari mata pelajaran kemudian berubah makna menjadi kumpulan semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan berada dalam tanggung jawab sekolah, lebih khususnya hasil belajar yang diharapkan (Nurmadiyah, 2018: 44).

Dari beberapa definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun

kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Kurikulum dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian yang terpenting dari sekian permasalahan bangsa. Setiap warga negara sudah dijamin oleh undang-undang 1945 untuk mendapatkan kecerdasan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan suatu program yang terencana, terukur dan dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh pihak terkait, itulah sebenarnya kurikulum. Berangkat dari pemikiran di atas maka, peranan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai arah atau pedoman dalam pencapaian tujuan pendidikan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Semakin baik pedoman itu dipelajari dan dilaksanakan maka semakin cepat pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian kurikulum sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Umar

Hamalik, (1990) Terdapat tiga peranan kurikulum dalam kegiatan pendidikan yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan ke tiga peranan kurikulum dalam pendidikan yaitu ;

1) Peranan Konservatif

Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu tersebut yang masih relevan dengan masa kini kepada peserta didik. Dengan demikian, peranan konservatif pada hakikatnya mendudukan kurikulum yang berorientasi kepada tradisi lama untuk ditanamkan pada generasi muda. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang selalu dinamis dan progresif. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat masa lampau dan masa sekarang.

2) Peranan Kreatif

Kurikulum selalu berperan dalam menciptakan suatu produk sebagai hasil kreasi dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap tuntutan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang.

3) Peranan Kritis dan Evaluatif

Peranan kritis dan evaluatif dimaksudkan bahwa kurikulum itu mampu mengantarkan para lulusan yang mempunyai kemampuan berfikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari serta menemukan solusinya. Hal ini perlu dimiliki oleh setiap individu, sebagai bekal hidup ditengah-tengah masyarakat yang sedang dan akan mengalami perubahan. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang

akan diwariskan tersebut secara kritis sekaligus mencari nilai-nilai budaya tersebut sesuai dengan tuntutan hari ini dan yang akan datang.

Berangkat dari ke tiga peranan kurikulum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum itu sebagai proses pewarisan nilai-nilai budaya dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, Peranan ini menekankan pada aspek masa lampau. Peranan kreatif dimaksudkan bahwa kurikulum itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, semestinya sudah terakomodir oleh kurikulum. Peranan ini lebih menekankan pada perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang menuntut setiap peserta didik untuk menyesuaikan. Adapun Peranan kritis dan evaluatif adalah dimaksudkan untuk melakukan seleksi, nilai-nilai budaya manakah.

B. Komponen dan Fungsi Kurikulum

Mengingat kembali fungsi kurikulum dalam proses pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tentu hal ini berarti sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan satu sama lain, berinteraksi dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum suatu sekolah mengandung tiga komponen yaitu: tujuan, isi, dan strategi.

Terdapat dua jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum satuan pendidikan atau sekolah sebagai berikut:

1) Tujuan kurikulum

Tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapainya yang telah dirancang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan serta sikap.

Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Setiap bidang studi dalam kurikulum suatu sekolah juga mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya.

Tujuan inipun digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu bidang studi pada sekolah tertentu (Ali, 1992: 52).

2) Isi kurikulum.

Isi dari kurikulum adalah berupa materi pembelajaran yang diprogramkan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

3) Media (sarana dan prasarana).

Media dalam kurikulum menjadi sarana pembelajaran bertujuan untuk menjabarkan kurikulum agar lebih mudah dipahami peserta didik.

4) Strategi.

Strategi pada kurikulum merujuk pada pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran serta teknik mengajar yang digunakan (M. Ahmad, 1998: 106).

5) Proses pembelajaran.

Komponen ini sangat penting, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

6) Evaluasi.

Dengan evaluasi ini maka akan diketahui seberapa jauh tujuan yang termuat pada kurikulum dicapai.

Menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama kurikulum yaitu: a) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. b) Pengetahuan (*knowledge*), informasi-informasi, data-data, aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. c) Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. d) Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut (Nurmadiyah, 2018: 44-45).

Sedangkan fungsi kurikulum, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa, dalam literatur lain, Alexander Inglis (dalam Hamalik, 1990) mengemukakan enam fungsi kurikulum sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*), artinya; kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini.

- 2) Fungsi Integrasi (the integrating function), artinya ; kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau konprehensif, artinya kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara konprehensif dan holistic.
- 3) Fungsi Diferensiasi (the differentiating function), fungsi yang ke tiga adalah the differentiating function artinya bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik.
- 4) Fungsi Persiapan (the propaedeutic function), artinya kurikulum mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- 5) Fungsi Pemilihan (the selective function) artinya bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kurikulum mampu menyediakan pilihan-pilihan kepada peserta didik untuk diseleksi sesuai dengan minatnya.
- 6) Fungsi Diagnostik (the diagnostic function), artinya kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan

dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan, maksudnya kurikulum yang dirumuskan tersebut berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survai atau observasi lapangan.

C. Kurikulum Pendidikan Islam

Pada awalnya integrasi antara dua sistem ilmu yaitu ilmu agama dan ilmu umum dianggap menambah persoalan dunia pendidikan Islam jadi rumit (Abd. Gafar, 2006: 38), yang menjadikan dikotomi pada pendidikan Islam (Rahmat, 2011: 141). Penggabungan tersebut melahirkan sistem kurikulum pada dunia pendidikan Islam. Kurikulum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan yaitu dari pengertian yang sederhana, sempit, dan tradisional hingga pengertian yang lebih luas, canggih, dan modern. Dilihat dari segi rumusannya, kurikulum pendidikan Islam bisa dikatakan tergolong sederhana atau tradisional, karena yang dibicarakan hanya masalah ilmu pengetahuan atau ajaran yang akan diberikan. Namun dilihat dari segi ilmu yang akan diajarkan dapat dikatakan sangat luas, mendalam dan modern, karena bukan hanya mencakup ilmu agama saja, melainkan juga ilmu yang terkait dengan perkembangan

intelektual, keterampilan, emosional, sosial, dan lain sebagainya (Nata, 2016: 112).

Kurikulum pendidikan Islam mempunyai fungsi yang berbeda dan lebih khusus yaitu sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan mendorong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kata lain orientasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja, juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat, tidak hanya mengembangkan segi-segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, melainkan juga pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang (Nata, 2016: 113).

Kurikulum Pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Tarikh, dan Kebudayaan Islam.

D. Model Konsep Pengembangan Kurikulum

Model konsep Pengembangan kurikulum sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada.

Model konsep kurikulum sangat berkaitan dengan aliran filsafat pendidikan yang dianut. Aliran filsafat pendidikan dapat dibedakan menjadi empat aliran, yaitu:

- a. Aliran Pendidikan Klasik. Aliran pendidikan klasik ini digunakan untuk mengembangkan model konsep kurikulum subjek akademis.
- b. Aliran Pendidikan Pribadi. Aliran ini digunakan dalam mengembangkan model konsep kurikulum humanistik.
- c. Aliran Teknologi Pendidikan. Aliran ini digunakan dalam mengembangkan kurikulum teknologis.
- d. Aliran Pendidikan Interaksionis. Aliran ini digunakan dalam pengembangan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial.

Berangkat dari 4 aliran filsafat pendidikan tersebut, maka ada para ahli kurikulum yang telah mengembangkan model konsep kurikulum yang sampai saat ini masih mempunyai relevansinya dengan kebutuhan peserta pendidik dan pengguna lulusan. Keempat macam model konsep kurikulum yaitu (1) Kurikulum Subjek Akademis, (2) Kurikulum Humanistik, (3) Kurikulum Rekonstruksi Sosial, dan (4) Kurikulum Teknologis (Sukmadinata, 2005:81). Keempat model konsep Kurikulum tersebut dijadikan rujukan dalam pengembangan pendidikan khususnya di Indonesia.

E. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam

Abdurrahman An-Nahlawi (1979; 177) (Budiyanto, 2013: 122-125) menjelaskan bahwa karakteristik kurikulum pendidikan Islam antara lain:

1. Kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang salah satu fungsi pendidikan adalah untuk menyelamatkan fitrah agar fitrah anak tetap “salimah”.
2. Kurikulum yang disusun hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam yaitu terwujudnya manusia berkepribadian muslim.

3. Pentahapan serta pengkhususan kurikulum harus memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing seperti berdasar usia, lingkungan, kebutuhan, jenis kelamin, dan sebagainya.
4. Penyusunan kurikulum di samping harus memperhatikan kebutuhan individu juga harus mempertimbangkan kebutuhan umat Islam secara kolektif atau keseluruhan. Intinya kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan ilmu-ilmu yang bersifat wajib.
5. Secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dan harus mengarah pada pola hidup yang Islami.
6. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang realistik artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta batas kemungkinan yang terdapat pada lingkungan yang melaksanakan.
7. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang komprehensif yang artinya mencakup seluruh aspek pengembangan jasmani, akal dan rohani.
8. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dibangun di atas prinsip kontinuitas yang memiliki

arti bahwa masing-masing bagian kurikulum itu saling berkesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal.

F. Unsur-Unsur Pendidikan Islam

Teguh Triwiyanto (2014: 24-26) menjelaskan unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi kesiswaan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.

Pendidikan yang kini menjadi harapan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik hendaknya selalu berangkat dari tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan yang akan dicapai sudah jelas, maka langkah selanjutnya dapat diteruskan dengan memikirkan perangkat-perangkat lain yang mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pendidikan memberikan penyadaran terhadap apa yang diketahuinya, kemudian pengetahuan tersebut harus direalisasikan sendiri dan selanjutnya mengadakan penelitian serta mengetahui hubungan kausal, yaitu alasan dan alur pikirnya. Ahli lainnya seperti Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah penyadaran terhadap *self realization*, yaitu kekuatan efektif (virtue) kekuatan untuk menghasilkan (efficacy), dan potensi untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui kebiasaan dan kemampuan berfikir rasional.

Tujuan pendidikan nasional kita yang berasal dari berbagai akar budaya bangsa Indonesia terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 tahun 2003, dikatakan : “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi kesiswaan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk lebih mudahnya pencapaian tujuan dari tujuan pendidikan nasional, maka terdapat pula tujuan pendidikan institusional. Tujuan institusional ini sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikannya,

seperti tujuan pendidikan taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tujuan pendidikan perguruan tinggi.

b) Kurikulum

Dalam bahasa Yunani kurikulum berasal dari kata *curir* yang artinya pelari dan *curere*, yang artinya tempat berpacu. *Curere* dalam Kamus Websters jika menjadi kata benda berarti lari cepat, pacuan, balapan berkereta, berkuda, perjalanan, satu pengalaman tanpa henti, dan lapangan perlombaan. Kurikulum memiliki jarak yang harus ditempuh pelari.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Tujuh pandangan mengenai kurikulum, yaitu kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan, kurikulum sebagai reproduksi kultural, kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, kurikulum sebagai *curere*, dan sudut pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum baru.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan kesiswaan . Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “napas atau inti” proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi kesiswaan .

c) Siswa

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang siswa yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, sedangkan perkembangan menyangkut psikis.

d) Pendidik

Tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

e) Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidikan yang berlangsung berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

f) Isi Pendidikan

Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

g) Lingkungan Pendidikan

Tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi yang dijabarkan dengan keluarga, sekolah dan masyarakat.

BAB 3

KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Konsep Kurikulum Berbasis Madrasah

Kecenderungan perubahan pembuatan keputusan kependidikan dari semula merupakan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan atau otonomi sekolah telah terjadi di negara Australia sekitar lebih dari dua dekade terakhir ini. Sementara di Indonesia, desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah memberikan suasana baru dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum madrasah, terlebih lagi setelah diberlakukannya Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP).

Perubahan tersebut meliputi perpindahan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas pengembangan kurikulum dari yang bersifat terpusat oleh

pemerintah menjadi kewenangan yang ada pada masing-masing sekolah/madrasah. Para guru dan seluruh komponen sekolah/madrasah menuntut lebih banyak kebebasan dalam menentukan kurikulum di sekolah/madrasah oleh warga madrasah. Tuntutan tersebut karena, model pengembangan kurikulum selama ini adalah *centre based or top down*, yaitu kebijakan pengembangan kurikulum yang sepenuhnya ditentukan oleh pusat, hanya sedikit sekali otonomi bagi setiap sekolah dalam proses pengembangan kurikulum.

Aspek perpindahan tanggung jawab di dalam pengembangan kurikulum memberikan otonomi yang luas kepada sekolah/madrasah dan guru di dalam mengambil suatu keputusan atas kurikulum apa yang perlu dikembangkan khususnya pada tataran sekolah/madrasah. Keluasan madrasah dan guru di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengembangan kurikulum sekolah/madrasah ini dikenal dengan sebutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah atau School-Based Curriculum Development (SBCD).

Dalam kenyataannya sulit menentukan apa yang khas atau unik dari SBCD dalam prakteknya, sebab meliputi suatu kontinum kegiatan yang berentang mulai

dari seleksi individu hingga penentuan seluruh staf sekolah. Banyak yang menganggap bahwa keadaan SBCD semacam itu merupakan praktik yang mengada-ada (kosmetik), atau sebaliknya memandangnya sebagai prestasi dari praktik SBCD. School Based Curriculum Development atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah merupakan pengembangan suatu kurikulum atau salah satu aspek dari kurikulum oleh satu orang guru atau lebih di suatu sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh sekolah, yaitu suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami dengan kurikulum yang ada . (Laurie Brady, 1990: 3-17).

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Apabila landasan atau fondasi pendidikan/kurikulum lemah dan tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusianya (peserta didik). Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Senada dengan pendapat Robert S. Zais, Ralph W. Tyler (dalam Ornstein & Hunkins,

1988) mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum.

Ada tiga aspek pokok yang menjadi landasan atau dasar, tumpuan, fondasi dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu : Filsafat, Psikologis dan Sosiologis. Untuk lebih jelasnya ke tiga landasan tersebut dapat dilihat urainya sebagai berikut :

1) Landasan Filsafat

Kedudukan Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran dan target dari proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam (Socrates) atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai ke akar-akarnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencari nilai-nilai kebenaran.

Berfikir secara mendalam tentang permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan merupakan target dari kajian filsafat. Proses pendidikan yang berlangsung pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran hasil filsafat yang diketemukan oleh para ahli. Menurut Redja Mudyahardjo (1989), terdapat

tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan, yaitu Idealisme, Realisme, dan Pragmatisme.

Filsafat idealisme berpandangan bahwa realitas yang ada ini terdiri dari ide-ide yang sudah dilahirkan, filsafat realisme malah kebalikan dari filsafat idealisme yaitu lebih mengandalkan pada realitas indrawi yang didasarkan pada pengalamannya, sedang filsafat Pragmatisme aliran filsafat yang beroreintasi pada hasil yang bersifat praktis dan mengandung manfaat bagi kehidupan.

Kajian filsafat pada awalnya mempersoalkan hakikat manusia, siapa manusia itu ? apa tugas dan kewajiban manusia ? darimana manusia berasal ? mau kemana setelah hidup ini ?. Berangkat dari hakikat manusia ini maka muncul berbagai kajian yang dilahirkan dari pemikiran filsafat, seperti manusia itu adalah makhluk beragama, makhluk sosial, makhluk dan berbudaya. Sebagai pengantar untuk mangkaji hakikat manusia tersebut maka muncullah tentang hakekat benar-salah yang diwadahi oleh ilmu (logika), hakekat baik-buruk yang diwadahi oleh (etika), dan hakekat indah jelek yang diwadahi dalam ilmu (estetika).

Ketiga ilmu ini mencerminkan pandangan hidup yang berhubungan dengan manusia, sehingga ketiga aspek tersebut sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan strategi, arah dan tujuan pendidikan. Berawal dari logika yang mempertanyakan keabsahan atau kebenaran sesuatu, diikuti dengan prinsip apakah sesuatu itu berguna bagi kehidupan dan mengandung keindahan.

2) Landasan Psikologis

Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik, maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, intelektual, moral maupun sosial. Namun demikian perlu juga diingatkan bahwa tidak semua perubahan perilaku siswa mutlak sebagai akibat intervensi dari program pendidikan. Ada juga perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh kematangan siswa itu sendiri atau pengaruh dari lingkungan di luar program pendidikan.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah

perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan.

3) Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi kurikulum. Untuk lebih jelasnya, coba cermati uraian berikut ini dengan seksama, kemudian Anda diskusikan dengan mahasiswa lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi saat ini, terutama sebagai pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan hidup masyarakat semakin luas dan semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.

Perkembangan masyarakat tersebut menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Pendidikan

harus mengantisipasi tuntutan kehidupan dalam suatu masyarakat, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mereka hidup. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat maka diperlukan rancangan pendidikan berupa kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan perkembangan masyarakat.

Pengembangan kurikulum yang hanya didasarkan pada kemampuan dasar saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pengembangan kurikulum harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan masyarakat setempat. Uraian tersebut, menunjukkan betapa pentingnya faktor kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi kurikulum.

C. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembang kurikulum biasanya menggunakan beberapa prinsip yang dipegangnya sebagai acuan agar kurikulum yang dihasilkan itu memenuhi harapan siswa, pihak sekolah, orang tua, masyarakat pengguna, dan tentunya pemerintah. Beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum, antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, kontinuitas, fleksibilitas, dan integritas.

1. Prinsip berorientasi pada tujuan

Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan merupakan fokus bagi komponen-komponen lainnya dalam pengembangan sistem tersebut. Ini berarti pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan.

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Untuk itu tujuan kurikulum harus jelas, artinya tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan

lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan kurikulum juga harus komprehensif, yakni meliputi berbagai aspek domain tujuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini perlu diperhatikan agar keluaran yang dihasilkan menguasai ketiga aspek domain tujuan tersebut secara utuh.

2. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan/materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Bahan atau materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMU/SMK sampai ke PT. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarkis fungsional. Untuk itu dalam pengembangan materi kurikulum harus diperhatikan minimal dua aspek kesinambungan, yaitu: (1) materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah (tingkat) yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah (tingkat) yang ada di bawahnya dan (2) materi yang sudah diajarkan/diberikan pada sekolah (tingkat) yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah (tingkat) yang ada di atasnya.

Dengan demikian dapat dihindari adanya pengulangan materi kurikulum, yang dapat

mengakibatkan kebosanan pada siswa dan atau ketidaksiapan siswa untuk memperoleh materi di mana mereka sebelumnya tidak memperoleh materi dasar yang memadai. Kontinuitas atau kesinambungan juga perlu diperhatikan antara berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu diupayakan pula agar tidak terjadi tumpang tindih materi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya.

Untuk menghindari hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun scope dan sequence setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Scope artinya ruang lingkup, sedangkan sequence artinya urutan atau sistematis.

3. Prinsip Fleksibilitas

Fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Para pengembang kurikulum perlu memikirkan bahwa implementasi kurikulum pada tataran yang sebenarnya akan terkait dengan keragaman kemampuan sekolah untuk menyediakan tenaga dan fasilitas bagi berlangsungnya suatu kegiatan yang harus

dilaksanakan. Belum lagi terkait dengan keragaman sumber daya pendidikan secara menyeluruh dan perbedaan demografis, geografis, dan faktor-faktor pendukung pendidikan lainnya.

4. Prinsip Integritas

Integritas yang dimaksud di sini adalah keterpaduan, artinya pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang *integrated*. Artinya, manusia yang berkemampuan selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya, mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Untuk itu kurikulum harus dapat mengembangkan berbagai keterampilan hidup (*life skills*).

Keterampilan atau kecakapan hidup (*life skills*) merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, dan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi pemecahan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan.

Keterampilan hidup bukan sekadar keterampilan manual dan bukan pula keterampilan untuk bekerja, tetapi suatu keterampilan untuk hidup yang dapat dipilah menjadi lima kategori, yaitu: (1) keterampilan mengenal diri sendiri (self awareness) atau keterampilan personal (personal skill); (2) keterampilan berpikir rasional (thinking skill); (3). keterampilan sosial (social skill); (4). keterampilan akademik (academic skill); dan (5) keterampilan vokasional (vocational skill).

Perlu dipahami bahwa dalam realitas empiris, keterampilan-keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan tatkala seorang individu melakukan suatu tindakan. Tindakan individu merupakan suatu perpaduan yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Perbedaan antara individu yang memiliki keterampilan hidup dan yang tidak memiliki keterampilan hidup terletak pada kualitas dari tindakan yang di lakukan.

Untuk mencapai keterpaduan tersebut, pembelajaran terpadu (integrated learning) merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan. Melalui pembelajaran terpadu siswa diharapkan mampu mengetahui hubungan keterkaitan antara suatu konsep atau bahan pelajaran dengan konsep atau bahan pelajaran lain. Pembelajaran

terpadu ini memberikan siswa kebebasan berpikir untuk menemukan sendiri tentang inti suatu konsep sehingga belajar dapat dijadikan sebagai suatu kegiatan pengalaman yang menarik.

D. Teori Perkembangan Kurikulum Berbasis Madrasah

Konsep school based curriculum development (SBCD) ini memiliki beberapa karakteristik yang secara umum mirip dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Di antaranya adanya partisipasi guru, partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah, variasi kegiatannya mencakup seleksi, adaptasi dan kreasi baru, adanya perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat meskipun bukan pemutusan tanggung jawab sama sekali, proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dan orang tua bahkan siswa, dan ketersediaan struktur pendukung untuk membantu guru maupun madrasah. Apapun namanya, apakah Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah atau Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), seharusnya pihak madrasah atau sekolah memanfaatkan semangat ini untuk mengembangkan madrasah dengan melibatkan seluruh

potensi yang dimiliki untuk melahirkan generasi muda Islam yang bermutu.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *botton up or school based curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada sekolah/madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum. Pendekatan tersebut merupakan lawan dari pendekatan *centre based or top down* yang sedikit sekali melibatkan sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum.

Pendapat lain mengemukakan pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat sekolah/madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum. Hal tersebut dilakukan dengan selektif dan atau adaptif dan atau kreatif. Lihat pada bagian I berikut.

Variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah

Kreatif				
Adaptif				
Selektif				

	Individual	Individual dalam parameters	Group	Whole Staff
Keterlibatan orang dalam SBCD				

Berdasarkan bagan di atas, maka dipahami bahwa Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah atau School Based Curriculum Development melibatkan beberapa hal yaitu: 1) Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah, 2) Melibatkan seluruh komponen sekolah/madrasah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain-lain, 3) Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaptif dan kreatif. Ketiga sifat inilah yang membedakan konsep pengembangan kurikulum sebelumnya. Meskipun Beberapa penulis menganggap bahwa kegiatan seleksi, adaptasi dan kreasi yang dilakukan oleh seorang guru tidak termasuk dalam kategori Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah seperti yang terlihat pada gambar di atas. 4) Adanya pergeseran tanggungjawab pengambilan keputusan kurikulum dengan tidak memutuskan garis

hubungan sekolah dengan pusat. 5) Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru, tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua dan siswa. 6) Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi 7) Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.

Pada dasarnya pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah bukanlah fenomena baru, tetapi sebetulnya sudah terjadi di beberapa sekolah, dan sangatlah sulit membuat batasan secara jelas atas pemahaman dari pengembangan kurikulum berbasis madrasah, karena pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah mencakup pemilihan individual oleh seluruh staf.

Oleh sebab itu, di dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah, pada tahap pertama kita perlu melakukan analisis situasi sekolah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 1) Struktur pendukung yaitu ketentuan administratif di dalam pengimplementasiannya baik di dalam maupun di luar sekolah 2) Struktur pengambilan keputusan yaitu ketentuan administratif di dalam sekolah untuk mengoptimalkan partisipasi staf 3) Pergerakan

akuntabilitas yaitu dampak dari kurikulum untuk semakin meningkatkan akuntabilitas sekolah 4) Perubahan persepsi atas peran guru yaitu kemampuan para staf di dalam menyesuaikan peran barunya sebagai pengembang kurikulum daripada hanya sekedar pelaksana kurikulum. 5) Sistem promosi yaitu melalui transfer dan promosi 6) Seorang ahli sekolah yaitu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam pengembangan kurikulum. (Laurie Brady, 1946 : 11-13).

E. Keterlibatan Personil

Personil yang terlibat secara historis ada empat macam person yang berbeda yang terlibat dalam pengambilan keputusan kurikulum.. Menurut Beauchand (1975), Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/ Madrasah sebagai berikut: “Specialized personnel, Representative groups composed of specialized personnel and class room teacher, all profesional personnel and all professional personnel plus representative lay citizens and student”.

1. Specialized personnel adalah yang pertama mereka yang berasal dari sekolah seperti guru dan supervisor. Biasanya mereka adalah ahli dan terlatih dalam bidang

kurikulum. Keahlian mereka adalah karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah ahli bidang studi atau mereka yang terlatih dalam penelitian organisasi kurikulum. Mereka memiliki *basic* dari perguruan tinggi dan bekerja serta berkonsentrasi dalam pengembangan disiplin ilmu tunggal yaitu konsultan.

2. Representative groups composed of specialized personnel and class room teacher adalah gabungan dari guru kelas dan group perwakilan dari para ahli.
3. All profesional personnel adalah seluruh guru kelas, supervisor, guru khusus dan administrator. Mereka inilah yang berpartisipasi dalam tiga sistem yaitu kurikulum, pembelajaran dan evaluasi. Asumsinya bahwa mereka yang mengambil keputusan rekayasa kurikulum adalah mereka juga yang mengembangkan, melaksanakan sekaligus mengevaluasi kurikulum.
4. All professional personnel plus representative lay citizens and student adalah mereka yang tersebut pada nomor tiga ditambah dengan warga masyarakat yang konsen terhadap sekolah. Walaupun ada yang mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam rekayasa kurikulum dengan alasan bahwa rekayasa kurikulum itu bersifat teknis. Para pendukung

beranggapan perlunya partnership dalam dunia pendidikan, sehingga tugas dari para masyarakat adalah melakukan pertimbangan nilai.

F. Kelebihan dan Kekurangan Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah

Beberapa keuntungan pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah yang dapat diidentifikasi adalah: 1) Guru-guru lokal dapat menentukan penggunaan sumber-sumber daya sekolah dengan baik. 2) Mereka yang mengimplementasikan kurikulum adalah mereka yang telah mengembangkan kurikulum tersebut. Ini memberikan suatu pemahaman yang lebih besar terhadap identifikasi tugas-tugas belajar. 3) Kebutuhan siswa terpenuhi, hal ini akan memiliki suatu pengaruh kuat pada siswa. 4) Akuntabilitas yang besar terhadap kurikulum dan penampilan guru terlihat. 5) Para orang tua dan anggota masyarakat dapat secara mudah terlihat dalam perencanaan kurikulum yang bermakna. 6) Dianggap sebagai suatu kemampuan untuk melakukan respon terbaik terhadap kebutuhan situasi kelas, kesadaran terbaik di antara para staf dan terlihat adanya hubungan luas untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan.

Sedangkan kelemahan Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Kurangnya struktur-struktur pendukung untuk para administrator dan guru. 2) Sindrom konformitas para administrator dan guru mengurangi kreativitas. 3) Kurangnya waktu bagi guru untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah. 4) Kurangnya guru yang berpengalaman atau terlatih dalam proses pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah. 5) Pergerakan guru antar sekolah untuk promosi layanan negara dan semacamnya menghasilkan suatu basis guru yang tidak stabil. 6) Memerlukan perubahan-perubahan signifikan pada peran guru dan administrator, yang secara alamiah menentang. 7) Sekolah-sekolah satu sama lain dengan cepat menjadi berbeda/tidak memiliki langkah yang sama dan tumpang tindih bisa muncul di antara sekolah-sekolah tersebut. 8) Para guru menganggap secara konsep SBCD merupakan model ideal, karena adanya latar belakang pengumpulan informasi, adanya perencanaan dan evaluasi, adanya kerjasama dengan orang lain, namun sangat kesulitan dan kontinuitas pelaksanaan 9) persoalan dana, persepsi prioritas kompetensi dan permasalahan kemampuan para staff. (Murray Print, 1993: 21-22).

BAB 4

PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

Pada dasarnya prosedur Pengembangan Kurikulum yang Berbasis Madrasah sama dengan prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah (School Based Curriculum Development) mengingat term madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama yaitu keduanya merupakan tempat belajar secara formal. Secara sederhana prosedur pengembangannya adalah sebagai berikut :

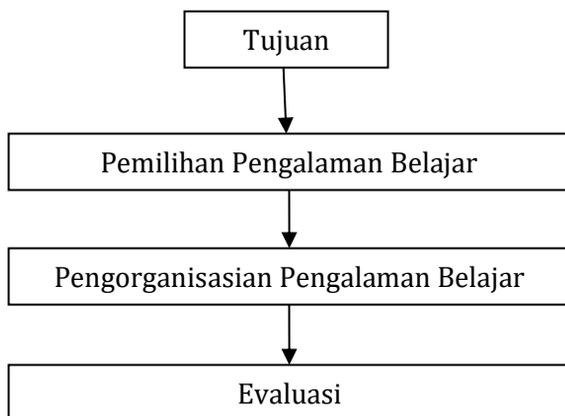
A. Pemilihan Model Pengembangan

Pemilihan model ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas atau kebutuhan masyarakat di mana madrasah itu berada. Beberapa model pengembangan berikut ini dapat dipilih oleh para pengembang kurikulum madrasah dengan

mempertimbangkan hubungan antara elemen kurikulum dan urutan penyusunannya sebagai berikut :

1. Model Rasional atau Tujuan

Model ini menekankan pada urutan elemen kurikulum, yang dimulai dengan tujuan, kemudian materi, metode dan diakhiri dengan evaluasi. Tujuan merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan elemen berikutnya. Ada dua macam model rasional ini, yaitu model Tyler dan model Taba. Pertama, Model Ralph Tyler. Menurut Tyler kurikulum harus disusun secara logis dan sistematis. Untuk menyusun kurikulum ada empat pertanyaan mendasar yang harus diajukan: 1). Apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai?, 2). Apa pengalaman pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? 3). Bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar secara efektif?, dan 4). Bagaimana menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai?. Dari empat pertanyaan tersebut di atas, model pengembangan Ralph Tyler dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Kedua, Model Hilda Taba. Model ini merupakan modifikasi dari model Tyler menjadi model pengembangan kurikulum yang sesuai di sekolah/madrasah. Agar kurikulum bermanfaat bagi siswa, menurut Taba, kebutuhan-kebutuhan siswa harus didiagnosis terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum bersifat induktif. Inilah kemudian yang membedakan model.

Tyler dan model Taba. Ada tujuh langkah pengembangan kurikulum menurut Taba, 1) mendiagnosis kebutuhan, 2) merumuskan tujuan, 3) memilih isi, 4) mengorganisasi isi, 5) memilih pengalaman belajar; 6) mengorganisasi pengalaman belajar, dan 7) menentukan alat evaluasi.

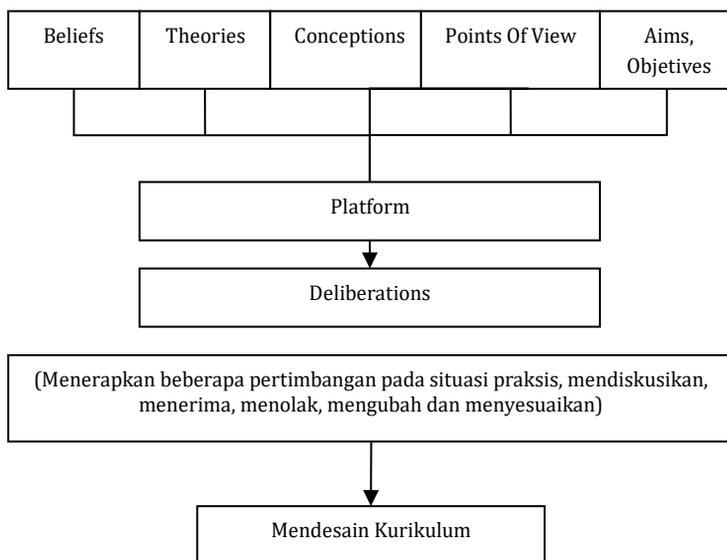
2. Model siklus

Model siklus ini sangat banyak sekali. Salah satu contoh model ini adalah model D.K. Wheeler. D.K. Ia mengembangkan dan memperluas gagasan kurikulum yang diajukan Tyler khususnya Taba. Ia mengemukakan, ketika dikembangkan secara sistematis-logis, kelima tahap yang saling terkait dalam pengembangan kurikulum akan menghasilkan kurikulum yang efektif. Ia menggabungkan elemen-elemen pokok yang digagas oleh Tyler dan Taba. Lima tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) pemilihan tujuan (aims, goals dan objectives), 2) pemilihan pengalaman belajar, 3) pemilihan isi, 4) pengorganisasian dan pengintegrasian pengalaman belajar dengan isi, dan 5) evaluasi masing-masing tahap dan pencapaian tujuan. Sumbangan penting Wheeler pada pengembangan kurikulum adalah penekanan pada konsep dasar proses kurikulum siklus dan elemen kurikulum yang saling terkait. (Murray Print : 1993).

3. Model Dinamik atau Interaktif

Model dinamik ini berangkat dari pendekatan deskriptif terhadap kurikulum dimana para peneliti telah mengadakan observasi tingkah laku guru dan pengembang kurikulum karena pada dasarnya merekalah yang menyusun kurikulum. Dengan demikian, hal ini akan menjadi landasan penting bagi penyusunan teori.

Konsekwensinya adalah pendekatan perspektif-analitis tidak begitu menonjol dalam model ini. Banyak penulis yang telah menuliskan model pengembangan kurikulum ini. Di antaranya adalah Decker Walker (1971) dan Malcolm Skilbeck (1976). Berikut ini contoh model yang dikembangkan oleh Decker Walker. Walker memulai dengan tiga tahapan dalam mempersiapkan penyusunan kurikulum. Ketiga tahap dimaksud dapat dilihat pada bagan berikut ini;



Bagan di atas menggambarkan tahapan pengembangan kurikulum dengan tiga tahap. Tahap pertama *statement platform* diakui oleh para pengembang

kurikulum. *Statement platform* ini terdiri atas sejumlah gagasan, pandangan, pilihan, kepercayaan, dan nilai. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi pembentukan dasar *platform*. Para pengembang kurikulum tidak boleh memulai tugasnya dengan tangan kosong.

Semua hal di atas yang mereka bawa dalam proses pengembangan kurikulum dan berguna sebagai landasan atau *platform*. Kemudian, tahap kedua adalah tahap pertimbangan yang mendalam. Pada tahapan ini setiap pengembang kurikulum mempertahankan *platform*nya dan memusyawarakannya untuk mencapai kesepakatan. Tahap terakhir adalah mendesain kurikulum. Pada tahap ini, setelah mendiskusikan secara panjang lebar, mereka membuat keputusan beberapa komponen proses. Keputusan tersebut dicatat dan menjadi landasan dokumen kurikulum.

4. Model Eclectic Murry Print

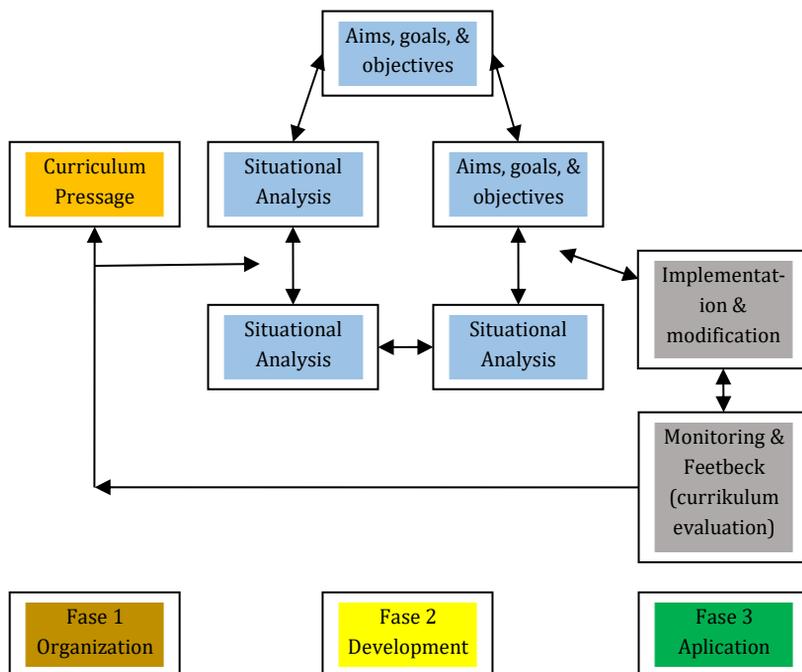
Model pengembangan kurikulum eklektik ini dirancang untuk menawarkan pendekatan pengembangan kurikulum yang dapat dipahami secara mudah. Pendekatan ini diadopsi dari pendekatan sistematis-logis dan dinamik. Pendekatan sistematis-logis di sini karena dalam pengembangan kurikulum harus dilaksanakan dalam prosedur tahap demi tahap. Sedangkan pendekatan

dinamik di sini karena menggambarkan situasi yang sedang terjadi ketika pengembang dan guru menyusun kurikulum.

Situasi ini ditandai dengan kebingungan dan tidak menentu yang akhirnya membutuhkan penjelasan yang tidak mudah. Dengan mengadopsi dua pendekatan diharapkan kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengembang kurikulum terutama para guru. Model ini dikembangkan di Australia setelah diadakan penelitian bahwa guru-guru tidak mengetahui banyak tentang kurikulum, model dan teori.

Ada tiga tahap yang harus diikuti dalam model pengembangan kurikulum ini, yaitu: organisasi, pengembangan dan aplikasi. Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada bagan berikut ini; 1) Organisasi. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang harus diajukan pada tahap ini yaitu a) siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, b) konsep kurikulum apa yang mereka bawa dan c) kekuatan-kekuatan apa yang mempengaruhi cara berpikir mereka. 2) Pengembangan. Pada tahap ini semua orang yang terlibat dalam penyusunan kurikulum berkumpul untuk menyusun kurikulum yang dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tahap ini pengembang mengikuti prosedur siklus yang

dimulai dari analisis situasi, tujuan, isi, kegiatan belajar, dan evaluasi kemudian kembali ke analisis situasi lagi. 3) Aplikasi. Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan yang tergabung yaitu: a) implementasi kurikulum, b) monitoring dan umpan baik pada kurikulum, dan c) penentuan data umpan balik pada kelompok presage.



B. Analisis Situasi dan Kebutuhan

Analisis Situasi dan Kebutuhan Analisis situasional merupakan komponen tahap awal dari implementasi pengembangan kurikulum. Tahap ini merupakan tahap pertimbangan, dimana sipengembang kurikulum akan memutuskan kebijakan kurikulum atas dasar penelitian, pengetahuan dan pemahaman situasi dimana kurikulum itu dikembangkan. Salah satu faktor yang harus dilakukan dalam pengembangan dan desain kurikulum adalah menganalisis situasional.

Hilda Taba (1962) mempopulerkan dengan '*diagnosis of need*' (diagnosa kebutuhan). Analisis situasional adalah pengujian detail dari konteks dimana kurikulum itu dipakai dan pengaplikasian analisisnya kepada kurikulum yang akan dikembangkan. Penganalisan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pengembangan kurikulum dengan cara analisis situasional yang sistematis. Analisis situasi dibutuhkan oleh pengembangan kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan baik untuk satu sekolah, kelompok sekolah, wilayah atau sistem pendidikan sekolah. seperti yang dilakukan di School-Based Curriculum Development (SBCD). Tahap awal analisis dilakukan oleh guru terhadap

lingkungan sekolahnya untuk mengembangkan kurikulum yang cocok atas kebutuhan siswa. Jika ingin kurikulum itu berguna, maka pertama kita harus mengetahui konteks dimana kurikulum itu dikembangkan.

Analisis situasional dapat didefinisikan sebagai proses pengujian konteks dimana kurikulum itu dikembangkan, serta pengaplikasian analisisnya pada kurikulum yang direncanakan. Ini adalah poin awal yang jelas untuk membangun suatu kurikulum, sekaligus sebagai kesempatan bagi pengembang untuk mencatat faktor lokal dalam mengembangkan kurikulum untuk mempertemukan kebutuhan siswa.

Alasan untuk melakukan analisis situasi dapat disimpulkan: 1) mengidentifikasi kebutuhan lokal dari siswa, orang tua, guru dan masyarakat, 2) memahami konteks kurikulum lokal, 3) memfasilitasi perencanaan dan pengembangan berikutnya, dan 4) menyediakan data base sistematis untuk menemukan tujuan umum dan khusus kurikulum. Secara singkat ada tiga tahapan pelaksanaan analisis situasional yaitu;

Pertama, analisis kebutuhan. Hal ini ditujukan untuk memperoleh kesepakatan pimpinan di masa yang akan datang untuk sebuah kurikulum dengan menentukan ketidaksesuaian antara situasi berlangsung dan yang

diinginkan. Analisis kebutuhan juga dapat digunakan oleh pengembang kurikulum untuk menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Secara ekstrim, ini berguna dalam memfasilitasi analisis situasi dan meletakkan dasar untuk seperangkat tujuan kurikulum.

Kelima fase tersebut adalah; 1) merumuskan pernyataan tujuan dengan melibatkan seluruh guru, masyarakat, orang tua dan mungkin siswa. 2) menilai pernyataan-pernyataan tujuan dengan menggunakan skala (katakanlah 1 sampai 5) oleh para individu dan kemudian dirata-ratakan dengan kelompok. 3) mengurutkan pernyataan-pernyataan tujuan menentukan pernyataan-pernyataan tujuan 4) memeriksa masing-masing pernyataan, baik subyektif (melalui penilaian guru) maupun obyektif (tes, pengujian, dan lain-lain), dalam bentuk apa yang terjadi di dalam institusi tersebut. Suatu kesenjangan dapat ditentukan dengan menggambarkan perbedaan antara realitas dan keadaan yang dipilih siswa. 5) mengembangkan rencana-rencana tindakan dengan menggunakan ketidaksesuaian sebagai suatu basis untuk perubahan, para pengembang kurikulum kemudian mulai menciptakan atau menyesuaikan kurikulum yang akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dirasakan.

Ketiga, pelaksanaan analisis situasional dengan melibatkan empat langkah; 1) mengidentifikasi permasalahan dalam konteksnya, 2) memilih faktor-faktor yang tepat, 3) pengumpulan dan analisis data dan 4) membuat rekomendasi. Terdapat dua jenis faktor analisis situasional, yaitu: 1) faktor eksternal sekolah yang meliputi perubahan dan harapan kultural dan sosial, prasyarat dan tantangan sistem pendidikan, perubahan hakekat muatan, sistem dukungan guru, sumber daya, 2) faktor internal sekolah yang terdiri atas siswa, guru, etos sekolah, sumber daya materi, permasalahan yang dirasakan. Setelah melaksanakan pengumpulan dan analisis data dalam suatu analisis situasional, para pengembang kurikulum membuat rekomendasi-rekomendasi untuk arah dan struktur kurikulum yang diajukan. (Murry Print, 1993: 109 -111).

C. Penentuan Aims, Goals, dan Objectives

Berikut penjelasan tentang Aims, Goals, dan Objectives secara sederhana. Istilah aims digunakan sebagai tujuan pendidikan yang merupakan harapan dan keinginan dari suatu masyarakat, atau apa yang diharapkan atau ingin dicapai oleh kurikulum secara luas.

Dengan kata lain, aims merupakan tujuan suatu pendidikan secara umum dan menunjukkan jangka waktu yang relatif panjang dan berlaku untuk beberapa tahun.

Sementara, istilah goals digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan aims. Secara jelasnya goals merupakan tujuan kurikulum yang dijabarkan dari aims. Biasanya dituangkapkan dalam bahasa yang tidak bersifat teknis, juga diarahkan pada pencapaian prestasi siswa dengan meningkatkan isi dan skill. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan goals adalah dengan memper-timbangkannya sebagai cara dari suatu institusi dan organisasi beserta masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, jika umpamanya tujuan (aims) sistem pendidikan itu adalah membuat siswa bisa membaca dan berhitung, maka tujuan (goals)-nya adalah cara suatu institusi pendidikan secara umum dalam mencapai tujuan (aims) tersebut. Goals merupakan tujuan yang bersifat jangka menengah.

Selanjutnya objectives merupakan rumusan tujuan kurikulum yang paling spesifik, yakni apa yang seharusnya siswa pelajari melalui interaksi dengan suatu kurikulum. Objectives menekankan pada perubahan tingkah laku siswa. Objectives merupakan penjabaran dari aims dan

goals, dan dinyatakan secara jelas, menggunakan bahasa teknis dan istilah-istilah perilaku.

Kriteria	AIMS	GOALS	OBJECTIVES
Definisi	Secara umum dinyatakan tentang apa yang harus di capai oleh suatu kurikulum	Tujuan Kurikulum yang dinyatakan secara lebi jelas dan penjabaran dari aims	Pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan suatu program dan merupakan penjabaran dari goals
Ekspresi	Dinyatakan secara luas menggunakan bahasa yang tidak bersifat teknis	Secara umum dinyatakan dengan bahasa yang tidak bersifat teknis	Bahasa yang bersifat teknis, kata kunci yang tegas dapat menggunakan istilah pelaku
Waktu	Tujuan jangka panjang biasanya untuk beberapa tahun	Tergantung pada bagaimana tujuan jangka (aims) tersebut dijabarkan ke dalam goals	Jangka pendek mencakup tujuan suatu pengajaran satu hari, satu minggu, satu semester
Dinyatakan oleh	Dinyatakan oleh masyarakat melalui bentuk-bentuk seperti politisi, sistem pendidikan, kelompok penekan.	Otoritas pendidikan dalam suatu sistem level daerah, perumus silabus, dokumen kebijakan sekolah.	Guru kelas secara individual, kelompok guru.

Sementara ciri-ciri tujuan (objectives) yang efektif adalah: 1) Comprehensiveness. Tujuan kurikulum ini

mesti dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan di antaranya adalah dari berbagai kalangan profesi, dan mesti mempertimbangkan perkembangan-perkembangan zaman serta perkembangan-perkembangan politik ekonomi yang terjadi. Komprehensif berarti tujuan kurikulum dirumuskan mesti mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

2) Consistency. Tujuan kurikulum itu harus terlihat hubungan secara efektif dan konsisten dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu sumber kekacauan atau ketidakjelasan tujuan adalah ketika tujuan khusus ini dirumuskan tanpa merujuk kepada tujuan umum (aims, goals).

3) Attainability. Tujuan kurikulum dirumuskan mesti memungkinkan dapat dicapai oleh siswa.

4) Suitability yakni kesesuaian dengan kebutuhan siswa dan siapa yang berhak menentukan kesesuaian tersebut. Para pengembang kurikulum sepakat, bahwa tujuan kurikulum mesti disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa.

5) Validity. Tujuan harus merefleksikan realitas apa yang mereka maksud, atau tujuan mesti menggambarkan apa yang mereka ingin capai.

6) Specificity. Tujuan pendidikan tersebut harus dirumuskan secara tepat, jelas dan spesifik. Tujuan yang tidak jelas dan tidak spesifik akan sulit dipahami baik oleh murid maupun oleh guru. Khususnya

oleh guru, akan sulit untuk dapat mengimplementasikan dan merealisasikannya. Maka untuk itu, tujuan ini mesti disusun dalam bentuk rumusan perilaku yang jelas dan spesifik.

D. Merumuskan Isi Kurikulum

Isi Kurikulum adalah bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai (values) yang terkait dengan bahan ajar yang disampaikan tersebut. Agar menjadi guru yang efektif, penulis menyebutkan isi kurikulum sebagai berikut: 1) Pengetahuan yang berisi fakta, prinsip, dan generalisasi yang ada dalam bahan ajar. 2) Pengetahuan pendidikan meliputi metode yang digunakan guru dalam mengajar agar siswanya benar-benar memahami materi ajar. 3) Pengetahuan Kurikulum, yakni pemahaman terhadap konteks kurikulum untuk mengajarkan pengetahuan tentang materi ajar.

Kriteria pemilihan isi kurikulum. Ada 6 kriteria pemilihan isi kurikulum, yaitu 1) Signifikan; dengan pengetahuan dan disiplin ilmu, keseimbangan antara konsep, ide dan fakta. 2) Validitas; konten harus otentik, benar dan akurat. 3) Relevansi sosial; berhubungan

dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, isu-isu kontroversi. 4) Utility (berguna); menyiapkan siswa agar hidup lebih "dewasa". 5) Learnability (dapat dipelajari); dapat digunakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda. 6) Interest; didasarkan pada minat (interest) anak didik. Sementara ruang lingkup isi kurikulum mengacu pada keluasan dan kedalaman kurikulum pada satu kurun waktu. Dalam menentukan ruang lingkup isi kurikulum, penulis menyarankan beberapa konsep yaitu Time Constraint (hambatan waktu), A common core (Konsep inti), Special needs of Content (kebutuhan khusus dari Isi), Integration of Content (keterpaduan isi) dan A total amount of content required (jumlah isi yang dibutuhkan).

Penyusunan materi juga harus mempertimbangkan keruntutan (sequence). Keruntutan adalah susunan dari isi kurikulum yang disampaikan pada peserta didik. Ada enam kriteria untuk mengurutkan isi kurikulum sebagaimana yang disarankan oleh Robert Zais, yaitu: dari yang sederhana menuju yang ruwet/sulit (simple to complex), pelajaran bersyarat (prerequisite learnings), kronologis (chronology), dari keseluruhan ke bagian-bagian (whole-to-part learning), dari konkrit ke yang

abstrak (increasing abstraction) dan pengurutan secara Spiral (Spiral Sequencing)

E. Seleksi metode-metode kurikulum

Pemilihan metode mungkin membutuhkan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Dampak dari metode sangatlah penting, dan pada bagian ini akan dipaparkan pentingnya pemilihan metode sebagai bagian utama dari komponen kurikulum.

Metode adalah bagaimana seorang guru di dalam mengaktifkan isi dari kurikulum, karena isi kurikulum akan berarti bagi siswa apabila guru dapat mentransmisikannya dengan berbagai cara. Tidak ada satupun suatu metode yang paling baik, sama halnya bahwa semua komponen kurikulum pada dasarnya adalah sama pentingnya. Untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, maka guru harus dapat memilih metode yang paling pas dari sekian metode yang ada. Beberapa kriteria di dalam memilih metode dan terlepas dari rumusan objectives adalah: 1) Prinsip-prinsip belajar. 2) Identifikasi kegiatan belajar yang dilakukan.

Selain kedua kriteria tersebut di atas, masih terdapat kriteria lainnya, yaitu: 1) Variety: metode harus bervariasi untuk mencapai tujuan dan dapat mengakomodasikan perbedaan tingkat dan gaya belajar siswa. 2) Scope yaitu metode harus cukup bervariasi di dalam mencapai seluruh tujuan yang sudah dirumuskan. 3) Validity yaitu metode khusus harus berhubungan dengan bagian-bagian rumusan tujuan. 4) Appropriateness yaitu metode harus berhubungan dengan minat, kemampuan dan keterbacaan siswa. 5) Relevance yaitu metode yang digunakan harus berhubungan dengan apa yang dibutuhkan setelah siswa tamat belajar.

Penelitian berkaitan dengan metode menunjukkan dan memberikan saran bahwa sebaiknya keterlibatan siswa di dalam perencanaan kurikulum harus semakin ditingkatkan, oleh sebabnya pertimbangan keterlibatan siswa di dalam pemilihan metode ke depan harus semakin dipertimbangkan di dalam upaya pemilihan isi kurikulum dan pencapaian tujuan.

Terminologi metode pada prinsipnya juga mencakup hal-hal berikut 1) Integration: paduan mata pelajaran ke dalam wilayah yang lebih besar sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar setiap mata pelajaran. 2) Sequence yaitu urutan mata pelajaran dan

pengalaman belajar ke dalam tahapan belajar yang dapat dikelola untuk pengembangan konsep, dan 3) arrangement yaitu organisasi mata pelajaran yang membuat logis dan semakin mudah dipelajari (Laurie Brady, 1946: 111-126).

Pada dasarnya tidak ada suatu metode tunggal yang lebih baik atau lebih buruk jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Setiap metode memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tersendiri. Seleksi metode penting untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, kriteria penyeleksiannya antara lain dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan identifikasi kegiatan belajar yang lebih, prinsip variasi, ruang lingkup, validitas, relevansi, dan kesesuaian metode.

F. Evaluasi Kurikulum

Meskipun evaluasi kurikulum adalah bagian dari totalitas sistem penilaian sekolah, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara fungsional semestinya bagian dari sistem kurikulum dan subject untuk rekayasa kurikulum. Ada empat dimensi dari evaluasi kurikulum yaitu: 1) Evaluasi guru dalam menggunakan kurikulum. Evaluasi guru dalam penggunaan kurikulum secara logis adalah hal

pertama untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengamatan data-data penggunaan guru terhadap kurikulum. Ketika guru tidak menggunakan kurikulum dalam pengembangan strategi pembelajarannya, maka evaluasi pun dihentikan. 2) Evaluasi desain kurikulum. Evaluasi desain adalah evaluasi yang paling sulit dilakukan karena ketiadaan kriteria dalam pelaksanaannya. Desain yang berbeda tentu tidak dapat dibandingkan dan disesuaikan dengan kriteria yang umum. Untuk memastikan kesuksesan seorang guru dalam menggunakan kurikulum, maka kecukupan desain perlu diperhatikan.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat aspek-aspek umum dari sebuah desain. Akan tetapi hal ini pun belum terformulasi. Meskipun kita tidak belajar banyak tentang bagaimana membandingkan desain kurikulum A dengan desain kurikulum B dengan sebuah pengawasan yang cukup, akan tetapi kita dapat mengevaluasi individual yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Salah satu contoh misalnya "goal dan objektives". Ketika sejumlah tujuan umum dan khusus dinyatakan dalam sebuah kurikulum, tujuan-tujuan yang prioritas kiranya lebih dahulu dievaluasi. Teknik Delphi atau beberapa teknik lainnya dapat membantu tugas ini. Jika

sebuah kurikulum mencakup sebuah tujuan tingkah laku yang khusus, maka kejelasannya merupakan hal penting untuk dievaluasi. 3) Evaluasi Lulusan. Evaluasi berikutnya adalah penilaian kurikulum sebagai instrumen untuk memprediksi lulusan. Hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan. Alasannya karena beberapa variabel sistem pembelajaran awal sekolah telah terjadi percampuran antara waktu perencanaan kurikulum dengan ketaatan pembelajaran siswa.

Pada tingkat penilaian pembelajaran siswa, kita dapat membedakan antara pembelajaran yang diinginkan dengan pembelajaran yang diperoleh di luar bidang kurikulum dan pembelajaran. Jika kurikulum adalah rencana dasar dengan tujuan yang diinginkan dan isi budaya yang diseleksi yang diharapkan untuk menghasilkan tujuan itu dan jika perencanaan pembelajaran telah diperluas ke dalam tujuan yang lebih khusus, maka tujuan itu yang menjadi dasar penilain usaha sengaja dari sekolah. 4) Evaluasi sistem kurikulum. Setiap aspek kurikulum harus di bawah pengawasan evaluasi. Buruknya sebuah sistem karena kurang vital.

Umpan balik dari sistem evaluasi itu seharusnya tersedia untuk memudahkan perbaikan sistem. Pemilihan arena, pemilihan orang yang terlibat, pengorganisasian

orang-orang untuk bekerja, prosedur kerja, tugas-tugas yang diperankan oleh kepemimpinan personal adalah keseluruhan subjek yang harus dievaluasi baik kelebihan maupun kekurangannya. Hal inilah yang membuat sistem kurikulum bekerja. Umpan balik dari evaluasi itu dapat membantu untuk memperbaiki sistem dan menyediakan keberlanjutan dan perkembangan sistem kurikulum dari tahun ke tahun. (Beauchamb, 1975 : 169- 172).

Adapun kriteria pelaksanaan evaluasi kurikulum yang baik adalah sebagai berikut: 1) Continuity yaitu evaluasi harus dilakukan berkesinambungan dan merupakan bagian terpadu di setiap bagian pembelajaran dan pengajaran. 2) Scope: prosedur evaluasi harus bervariasi sebagai cakupan dari tujuan. 3) Compatibility: evaluasi harus kompatibel dengan rumusan tujuan. 4) Validity: prosedur evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Test juga harus reliabel, misalnya konsisten di dalam pengukurannya. 5) Objectivity: evaluasi harus didasarkan pada objektivitas, dan hindari yang mengarah pada subjektivitas dan 6) Diagnostic value: evaluasi harus mengenal tingkatan performa siswa dan proses yang diperlukan untuk mencapai performa tersebut. 7) Participation yaitu prosedur evaluasi dimungkinkan untuk ditingkatkan oleh para siswa itu

sendiri. (Laurie Brady, 1946 : 132-136). Sementara model evaluasi yang digunakan, para pengembang kurikulum dapat memilih berbagai model evaluasi yang ditawarkan secara konsep oleh para ahli evaluasi kurikulum.

G. Implementasi Kurikulum

Implementasi berarti menempatkan kurikulum untuk direalisasikan. Ada dua pertimbangan untuk sebuah kurikulum yaitu sebagai bagian dari pengajaran dan sebagai sebuah sistem untuk memprediksi hasil pembelajaran. Dalam Implementasi berarti menempatkan kurikulum untuk direalisasikan. Ada dua pertimbangan untuk sebuah kurikulum yaitu sebagai bagian dari pengajaran dan sebagai sebuah sistem untuk memprediksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum terdiri dari berbagai proses untuk menyelesaikan dua tujuan tersebut. Tugas pertama dari implementasi kurikulum adalah mengatur lingkungan sekolah sehingga sebuah kurikulum dapat digunakan oleh guru sebagai bagian penting dari pengajarannya. Implementasi berada pada wilayah gabungan sistem kurikulum dengan sistem pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum menjadi alat kerja

bagi guru. Peran perencana kurikulum itu dikomunikasikan dan ditafsirkan oleh guru untuk sekelompok siswa.

Syarat utama dalam implementasi kurikulum adalah komitmen para guru untuk menggunakan kurikulum sebagai bagian dari pengembangan strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan komitmen guru tersebut maka perlu adanya panduan dan melibatkan mereka dalam perencanaan serta administrasi kepemimpinan.

H. Umpan Balik dari Perubahan Kurikulum

Dalam pelaksanaan sebuah kurikulum, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya umpan balik atau perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaannya. Perubahan kurikulum tetap mencerminkan perubahan di dalam masyarakat dan pendidikan secara umum. Karenanya kebanyakan yang berhubungan dengan perubahan kurikulum di dalam sekolah tersebut menunjuk pada cara menerapkan perubahan terefektif. Suatu inovasi kurikulum akan mengubah masyarakat ke arah tertentu,

tetapi pada dasarnya perubahan kurikulum mencerminkan perubahan masyarakat.

Dalam perubahan kurikulum terdapat beberapa konsep antara lain: 1) Inovasi merupakan suatu obyek, gagasan atau praktik yang bersifat baru dan dengan proses yang baru, dimana gagasan atau praktik dapat diadopsi. 2) Difusi adalah suatu proses yang terkait dengan penyebaran suatu gagasan yang baru dari orang yang mengadopsinya. 3) Dissemination yaitu suatu proses yang sengaja untuk menyebarkan suatu idea yang baru yang berasal dari orang yang mengadopsi. 4) Change agents yaitu individu dan kelompok yang terlibat dalam proses perubahan melalui jalur komunikasi antara innovator dan klien. 5) Adoption mengacu pada penerimaan awal dari suatu inovasi dan tingkat penerimaannya dalam suatu sistem.

Sementara sumber perubahan kurikulum ada empat prinsip pokok sebagai berikut: 1) Kurikulum berubah di sekolah-sekolah mencerminkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. 2) Bahwa kurikulum sekolah tersebut bereaksi terhadap perubahan di dalam masyarakat secara cepat dan sengaja. 3) Perubahan-perubahan terjadi dikarenakan adanya benturan secara implisit yang ada di dalam praktik dengan kebijakan

kurikulum. 4) Bahwa perubahan-perubahan mungkin dibuat atau dicari di dalam kebijakan kurikulum dan praktik untuk mempromosikan tujuan tertentu atau mencapai sasaran tertentu di dalam sistem.

Adapun Proses perubahan kurikulum sekolah pada umumnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain: adanya perubahan kurikulum akibat dari inisiatif sekolah karena kebutuhan dari para siswa yang berbeda. Berdasarkan riset para ahli kurikulum bahwa terdapat empat tahap-tahap dasar proses perubahan kurikulum (Fullan, 1982, 1987; Miles,1987; Smith & Lovat,1991; Print, 1988), Yaitu: 1) Kebutuhan (need). Di awal proses perubahan kurikulum dikarenakan adanya perhatian, ketidakpuasan atau kebutuhan dengan kurikulum yang sudah berjalan. Kebutuhan dapat bersumber dari para guru, para siswa, orang tua, pengurus-pengurus, sistem bidang pendidikan atau didasarkan pada gabungan beberapa sumber pertimbangan di atas. 2) Adopsi. Adopsi berarti penerimaan yang sengaja terhadap suatu inovasi, sebagai bentuk pernyataan dalam memutuskan akan satu kebutuhan. Faktor-faktor penting di dalam keberhasilan suatu adopsi antara lain: bahwa adanya akses dengan pengambil kebijakan/keputusan; adanya beberapa bentuk alternatif dari inovasi; adanya dukungan administratif dari

pusat untuk inovasi, inovasi tersebut merupakan kebutuhan bersama dan memiliki kualitas yang baik, ketersediaan pembiayaan dalam mendukung implementasi, peran dan efektivitas penuh dari agen-agen perubahan masyarakat yang stabil. 3) Implementasi. Implementasi merupakan suatu rangkaian dari adopsi terhadap suatu inovasi sampai kepada proses penerimaan atau pelembagaan yang lengkap. 4) Pelembagaan/berkesinambungan yaitu suatu inovasi harus dilaksanakan secara terus menerus/kontinyu dari waktu ke waktu dalam proses berintegrasi dalam satu struktur organisasi. Disadari pada tahap ini memerlukan banyak waktu dan perubahan tidak dapat diberikan suatu jaminan bahwa inovasi sukses sampai pada pelembagaan. (Murry Print, 1993: 221).

I. Peran Orang Tua/Wali dan Masyarakat

Dalam rangka menjadi lembaga pendidikan Islam unggulan, maka madrasah dalam melakukan seluruh kegiatannya tetap memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. “Madrasah yang lahir dari dan untuk masyarakat harus tetap mempersiapkan kebutuhan yang nyata dari masyarakat sebagai pemilik lembaga

pendidikan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional dan global.” Keterbatasan partisipasi masyarakat akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

Bentuk-bentuk kepercayaan yang dimaksud dapat berupa partisipasi masyarakat dalam memobilisasi sumber-sumber dana yang tersedia pada orang tua dan masyarakat, sementara dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan berkurang, apalagi madrasah yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama, bukan di bawah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satu bentuk keterlibatan orang tua atau masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam pengembangan kurikulum. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ramsay dkk dengan judul “*Development Patnership: Collaboration between teachers and parents*” bahwa terdapat enam tahapan sistematis yang dapat dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam upaya melibatkan orang tua atau masyarakat dalam mengembangkan kurikulum sekolah dalam hal ini termasuk madrasah. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, pra pengembangan atau persiapan kerja. Dalam tahapan awal ini, pengembang kurikulum mengidentifikasi tingkat keterlibatan orang tua dalam sekolah. Dalam pelaksanaannya, para guru sesungguhnya dapat bertindak sebagai peneliti (research) dalam rangka pengembangan kurikulum.

Kedua, mulai bekerja. Pengembang kurikulum melakukan pertemuan dengan pihak sekolah berupa kepala sekolah, para staff, dan para orang tua. Dari pertemuan ini, pengembang kurikulum memperoleh ide atau informasi yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya.

Ketiga, membangun lingkaran kerja. Pada tahapan ini, pihak sekolah membentuk sebuah struktur atau mengangkat pengurus Komite Review Kurikulum (Curriculum Review Commite). Komite ini bertujuan sebagai pengendali atau pengarah atau kepemimpinan group. Sekalipun melibatkan orang tua dan masyarakat dalam tahapan ini, para guru tetap menjadi kunci utama yang harus menjaga atau menjamin pelaksanaan kurikulum di kelas serta menjadi kunci dalam teknik berinteraksi dengan para orang tua. Berkaitan dengan ini, diharapkan setiap sekolah memiliki rincian pribadi siswa, latar belakang keluarga, pengalaman pendidikan dan

karakteristik pembelajaran dan perilaku siswa. Untuk mengetahui hal ini, beberapa sekolah mengirimkan angket untuk orang tua atau dengan mewawancarai siswa sendiri.

Keempat, melakukan pertemuan rutin dengan para orang tua/masyarakat. Minimal ada tiga kategori pendekatan yang dapat dilakukan untuk melibatkan orang tua yaitu 1) Aktifitas sosial yang membuka kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam aktifitas pendidikan seperti jamuan makan malam multikultural, hari olah raga sekolah, dan lain-lain. 2) Kegiatan yang terpusat pada anak dengan menfokuskan diri pada penggambaran perhatian orang tua atau keterlibatan mereka dalam beberapa pembelajaran khusus bagi anak atau pertimbangan perilaku. 3) Kegiatan yang terpusat pada isu tertentu. *Kelima*, Melakukan pertimbangan, pengelompokan dan perencanaan ulang dalam bentuk evaluasi bersama. *Keenam*, Pengembangan piagam kerja sama.

Rachel Bolstad, (2004 : nzcer.org.nz)
Koentjaraningrat (1982) membagi dua partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum yaitu partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan orang tua dan masyarakat terhadap pengembangan dan

pelaksanaan kurikulum. Sementara partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi partner orang tua dan masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Madrasah untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat adalah 1) melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pentas seni dan lain-lain. 2) mengidentifikasi tokoh masyarakat (orang tua, tokoh agama, olahragawan, seniman dan lain-lain) yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. 3) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam berbagai program, seperti melibatkan kepolisian dalam kegiatan baris berbaris. 4) memilih waktu yang tepat untuk melibatkan orang tua dan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang.

Sementara itu, Depdiknas (2000) menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum adalah melaksanakan program-program kemasyarakatan, mengadakan open house yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui program sekolah,

mengadakan bulletin sekolah dan membuat program kerja sama dengan masyarakat.

Memperhatikan pandangan di atas, tampaknya keterlibatan orang tua dan masyarakat, hanya terfokus pada pelaksanaan kurikulum madrasah. Hal ini berarti orang tua dan masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam mendesain dan mengembangkan kurikulum seperti yang diinginkan konsep Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah.

BAB 5

PENGEMBANGAN KARAKTER MADRASAH

A. Madrasah

Kata madrasah berasal dari “darasa” yang berarti belajar. Kata ini kemudian di-tashrif dalam bentuk isim makan (kata yang menunjuk pada tempat) menjadi madrasah yang berarti tempat belajar baik bagi murid yang level (TK, SD/MI, SMP/MTS/SMU/MA) rendah maupun level tinggi (Perguruan Tinggi). Makna lain dari “darasa” adalah terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih dan mempelajari. (Luis Ma’luf, 1986 : 187).

Berdasarkan arti madrasah tersebut, maka diketahui bahwa istilah madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah juga tidak hanya diartikan

sebagai sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai dengan rumah, istana, kuttab, masjid, perpustakaan, surau dan tempat-tempat lainnya. Bahkan seorang ibu dapat dikategorikan sebagai al-madrasah al'ula (madrasah pemula). Al-Hasyimi (1985 : 200) Secara historis menurut Al-Maqrizi, madrasah tidak dikenal pada masa sahabat dan tabi'in. Ia diciptakan sesudah 400 tahun setelah Hijriyah. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah "madrasah" secara definitif baru muncul pada abad-11 M. Penjelmaan istilah "madrasah" merupakan transformasi dari masjid ke madrasah.

Ada beberapa teori yang berkembang seputar transformasi ini, di antaranya ; pandangan Ahmad Syalabi (1954) menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid yang tidak hanya dalam kegiatan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bentuk ibadah ijtima'iyah. Sementara itu, meskipun ada yang beranggapan bahwa peralihan dari masjid ke madrasah itu terjadi secara tidak langsung. Ahmad Syalabi (1954 : 257-259)

Terjadi perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam. Di antara pandangan

tersebut adalah ; 1) madrasah sebagai lembaga pendidikan formal telah dikenal adanya “Madrasah Nidzamiyah” di Bagdad yang didirikan oleh Nidzam al-Muluk seorang wazir dari dinasti Saljuk pada awal abad ke-11 M. atau Tahun 457 H., 2) menurut al-Jumbulati (1994) bahwa sebelum abad ke-10, madrasah yang pertama berdiri adalah madrasah al-Baihaqiah di kota Nisabur yang didirikan oleh Abu Hasan al-Baihaqi (w. 414 H). 3) Menurut Richard Bulliet (1972) bahwa madrasah Miyan Dahiyah di Nisapur berdiri dua abad sebelum berdirinya madrasah Nizyamiyah di Bagdad yang mengajarkan fiqh malikiyah. (Suwito, 2004: 214-215). Terlepas dari perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam, namun madrasah Nidzam al-Muluk adalah madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah dan masyarakat Islam. Menurut Mehdi, meskipun madrasah Nidzam al-Muluk bukan sebagai madrasah yang pertama didirikan, namun madrasah ini memiliki spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dari tujuan politik dan agama. Dan yang paling menarik adalah proses pendirian madrasah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, ulama-ulama, dan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa madrasah Nidzamiyah ini didirikan atas kemauan dan keinginan bersama bukan

keinginan sepihak. Sementara madrasah dalam konteks Indonesia, pada dasarnya merupakan fenomena modern yang baru muncul pada abad 20 M, karena pada masa awal masuk dan berkembangnya Islam, masyarakat Islam masih menggunakan rumah-rumah, langgar, surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah di Indonesia lahir sebagai hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada masa awal yang sudah ada di satu sisi dengan pendidikan modern (umum) di sisi lain.

Di antara para ulama yang berjasa dalam mendirikan madrasah di Indonesia adalah Syekh Abdul Karim yang mendirikan madrasah Thawalib di Padang Panjang, H. Abd. Somad mendirikan madrasah Nurul Iman (1913) di Jambi, Madrasah Sa'adah Adabiyah didirikan Teungku Daud Beureueh di Aceh (1930), dan ulama lainnya melakukan hal yang serupa di berbagai tempat di Indonesia. Sementara ulama yang mengembangkan kemudian di antaranya; Syekh Amrullah Ahmad (1907) di Padang, K.H. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H. Wahab Hasbullah bersama K.H. Mansyur (1914) di Surabaya dan lain-lain. (Abdurrahman Shaleh, 2005: 18-20).

Pada masa awal berdiri dan berkembangnya madrasah di Indonesia, tampaknya mengalami masa sulit. Pada awal kemerdekaan, madrasah terus hidup dan berkembang, tetapi tidak memperoleh bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Madrasah dan dunia pendidikan Islam lainnya pada umumnya dibiarkan hidup apa adanya. Perhatian pemerintah hanya sebatas memberikan dorongan moril saja. Namun, dalam perkembangannya, madrasah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang termarginalkan, tetapi madrasah telah menjadi Sub Sistem Pendidikan Nasional yang tentu saja tidak akan berbeda dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di madrasah akan mengacu pada empat hal yaitu pemerataan, relevansi, kualitas dan efisiensi.

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah daerah, semakin membawa angin segar dan konsekwensi yang cukup signifikan dalam pengelolaan pendidikan termasuk pengelolaan madrasah. Kebijakan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh.

Meskipun Undang-Undang otonomi daerah tidak menghapus sama sekali kewenangan pusat dalam mengatur pendidikan di setiap satuan pendidikan termasuk madrasah, maka semestinya madrasah menangkap semangat desentralisasi pendidikan ini dengan memberdayakan seluruh potensinya dalam mengatur dan mengelola dirinya sendiri, termasuk dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. (Hasbullah, 2007: 17).

Perkembangan madrasah merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Madrasah merupakan lembaga persekolahan ala Belanda dengan muatan keagamaan. Pengembangan tradisi pendidikan rakyat Indonesia pada masa itu diusulkan untuk dimanfaatkan oleh Belanda. Namun secara teknis usulan tersebut sulit terpenuhi karena tradisi pendidikan Islam masih dipandang memiliki kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pembelajarannya. Untuk memperbaiki pendidikan Islam beberapa tokoh menempuh pendidikan Islam tradisional dan sekolah umum ala Belanda. Mereka mengkombinasikan pelajaran keagamaan dengan pelajaran membaca, menulis,

berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kebudayaan, dan keterampilan organisasi.

Metode pengajarannya pun disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Ciri madrasah pada masa ini masih bersifat pribadi dan merupakan organisasi yang masih sempit. Tidak ada pengaturan yang bersifat umum dan mengikat mengenai bentuk kelembagaan, struktur, manajemen, dan kurikulumnya. Usaha pendirian madrasah bertujuan untuk meningkatkan peran umat Islam.

Kebijakan yang kurang menguntungkan berlanjut pada masa penjajahan Jepang yang menghapuskan sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia digunakan lebih luas di lingkungan pendidikan, kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah. Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah namun tetap mewaspadaai madrasah karena berpotensi untuk melawan kedudukan Jepang di Indonesia. Atas dibukanya madrasah pada masa ini, kalangan ulama Minangkabau mengusulkan membentuk Majelis Islam Tinggi yang mengkoordinasikan pendidikan agama di sekolah maupun madrasah. dan pemerintahan Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius pada usulan ini.

Majelis ini menjadi penggagas munculnya pendidikan Islam awaliyah di usia minimal 7 tahun. Program pendidikan awaliyah ini dilakukan sore hari untuk menyeimbangkan anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah rakyat di pagi hari. Masa orde lama merupakan proses dasar pembaharuan kelahiran madrasah formal. Di masa sebelumnya kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap madrasah bersifat menekan, dikarenakan kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslim terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis kultural, namun juga bersifat psikologi politik.

Masa itu erat kaitannya dengan peran Departemen Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946. Lembaga ini memperjuangkan politik pendidikan Islam Indonesia. Bagian pendidikan pada Departemen ini memiliki tugas yang meliputi: (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan swasta, (2) Memberi pengetahuan umum di madrasah, (3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN).

Departemen Agama mengurus pengajaran agama di sekolah negeri swasta dan pengajaran umum di madrasah, penyelenggaraan Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Departemen ini menaungi madrasah di luar sistem pendidikan nasional yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Memasuki masa orde baru dipandang madrasah harus ditingkatkan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan agama dilaksanakan sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional yang tidak terpisahkan.

Di tahun 1970-an, masyarakat Islam keberatan dengan penyelenggaraan madrasah di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pemerintah melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus menerus berkaitan dengan Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam madrasah. Pemerintah pun mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres No. 34 dan Impres No. 15 Tahun 1974 yang isinya: (1) Pembinaan Pendidikan umum adalah tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan, sedangkan tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab menteri agama, (2) Untuk pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan impress No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara

Departemen P & K, departemen dalam Negeri dan Departemen Agama.

Setelah adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, disusul adanya penyusunan (Surat Keputusan Bersama) SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975,25 dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1, ayat (2) misalnya dinyatakan Madrasah itu meliputi 3 Tingkatan: (a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, (b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Setelah adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, disusul adanya penyusunan (Surat Keputusan Bersama) SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975, dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1, ayat (2) misalnya dinyatakan Madrasah itu meliputi 3 Tingkatan: (a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, (b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Bab II pasal 2 disebutkan bahwa: (a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah

Sekolah Umum setingkat, (b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas, (c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah Umum yang setingkat. Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam bab IV pasal 4 sebagai berikut: (a) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (b) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (c) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri²⁶ Untuk kurikulum madrasah 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum madrasah 1976. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana telah disebutkan penyusunan Kurikulum Madrasah 1984 berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0299/U/1984 dengan Menteri Agama (Menag) No. 045/1984 tentang "Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah", yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang

dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Madrasah mengalami pengintegrasian saat lahirnya UUSPN No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup ketentuan semua jalur dan jenis pendidikan. Baik jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.²⁷ UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1945. Undang-undang berisi penegasan definitif tentang madrasah yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya.

Melalui upaya ini madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan.²⁸ Dengan berlakunya UUSPN nomor 2 tahun 1989 beserta perangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka pendidikan di madrasah banyak mengacu pada sistem pendidikan nasional, baik menyangkut satuan dan jenjang pendidikan maupun kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikan.

Sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, madrasah harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang

tersebut madrasah pada dasarnya sepadan dengan sekolah umum dengan sedikit perbedaan, yaitu madrasah memberikan penekanan khusus pada mata pelajaran agama Islam. Selain itu Departemen Agama dengan bantuan para ahli pendidikan Islam berupaya memasukkan apa yang mereka sebut “nuansa Islam” dalam menulis buku-buku teks berkenaan dengan masing-masing mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 1994. Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal.

Kurikulum lokal ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlaku dalam SK Menteri Agama RI Nomor 371, 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut: “Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat”.

Pada kurikulum 1994 guru diberi wewenang untuk improvisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalam mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kebutuhan. Guru diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

sehingga peserta didik aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik dan mental (intelektual dan emosional) maupun sosial. Perjuangan memasukkan pengajaran agama dalam sistem pendidikan nasional berhasil setelah diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang disahkan presiden pada Tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang ini mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus.

Pada undang-undang sisdiknas 2003, madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu:

1. Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. pelajaran umum tidak semua harus diajarkan tiap tatap muka, demikian juga pelajaran agama. Yang diajarkan hanya yang esensial saja. Dengan demikian anak didik dapat lebih berkonsentrasi kepada pelajaran utama sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dengan tujuan menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan umum dan sebagai muslim yang baik.
2. Madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, di mana fokus utama adalah pelajaran agama. Pelajaran umum hanya sebagai penunjang saja. Dalam hal ini harus diberikan kebhinekaan program antara madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, Namun standard umum harus sama dengan sekolah dan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas. Menghasilkan lulusan yang menguasai

pengetahuan agama dengan baik, namun memahami dasar ilmu dan teknologi sebagai pelengkap kehidupan.

3. Madrasah sebagai sekolah kejuruan, dimana fokus pelajaran pada ketrampilan hidup (life skill) namun sebagai muslim yang baik. Pola pendidikan mengikuti pola sekolah umum kejuruan dengan prinsip seperti pola madrasah

B. Pengembangan Ciri Khas Madrasah

Madrasah sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat, seharusnya senantiasa berusaha keras untuk mengembangkan kurikulumnya dengan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, madrasah harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki dengan menerapkan konsep pengembangan kurikulum berbasis madrasah di atas. Diharapkan dengan konsep ini, madrasah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

C. Pengembangan pada Bidang Keagamaan

Dalam pasal 55 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat

sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, setiap satuan pendidikan termasuk madrasah mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan dan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hal di atas, maka perguruan Islam, khususnya madrasah juga memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang khas yaitu manusia muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan menjadikan semua mata pelajaran sebagai wahana untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal dan lain-lain. Semua mata pelajaran ini diberikan nuansa keagamaan atau pelaksanaannya dijiwai oleh pendidikan agama.

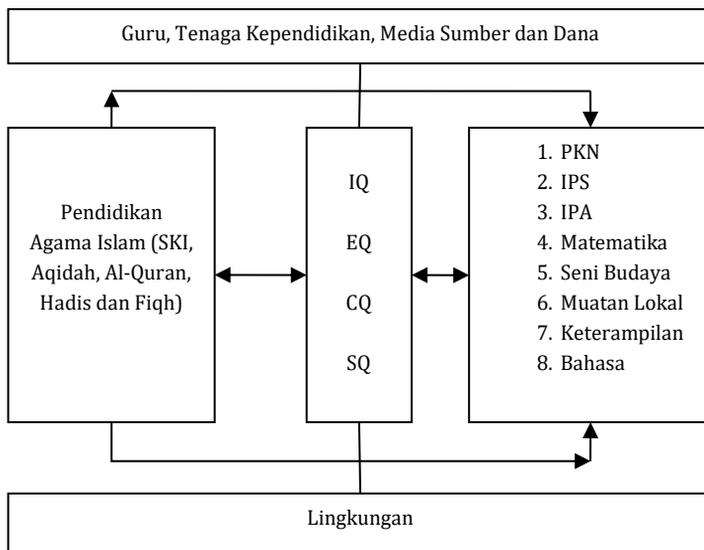
Menurut Muhaimin, bahwa kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam

bidang studi umum seperti IPA, IPS, Matematika, dan bidang studi lainnya.

Dengan demikian, kesan dikotomis menjadi hilang. Model pembelajaran yang cocok adalah *team teaching* yaitu guru bidang studi umum bekerja sama dengan guru bidang studi agama Islam seperti Aqidah Akhlak, Fiqh, Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam untuk menyusun desain pembelajaran yang aplikatif dan detail untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Secara sederhana, bagan di bawah ini memperlihatkan model kurikulum terpadu bagi madrasah dimana bidang studi rumpun agama Islam yang terdiri dari Aqidah Akhlak, Fiqh, Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam serta penciptaan suasana lingkungan yang religius harus menjadi komitmen bagi setiap warga madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik keislaman.

Bidang studi rumpun agama Islam merupakan inti sehingga bahan-bahan yang termuat dalam bidang studi umum PKN, IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal, Keterampilan dan Bahasa harus dijiwai oleh pendidikan agama Islam. Bidang studi rumpun Agama Islam juga menjadi motivator dan dinamisator bagi pengembangan kualitas IQ (Intelligence Quotient), EQ,

(Emotional Quotient), CQ (Creativity Quotient) dan SQ (Spritual Quotient). (Muhaimin, 2007: 217).



Pengembangan ciri khas madrasah bidang Keagamaan juga dapat ditandai dengan adanya berbagai kegiatan seperti meningkatnya program pendidikan agama secara optimal seperti penambahan jam pelajaran agama, semakin terhindarnya kegiatan pendidikan yang dikotomis antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, terwujudnya suasana keagamaan yang tercermin dalam kehidupan ibadah dan perilaku, meluasnya kegiatan ekstra kurikuler yang menitikberatkan pada pengembangan kepribadian secara utuh dan semakin terpeliharanya pelaksanaan ajaran agama Islam di sekolah

seperti kekeluargaan, harga diri, semangat kebersamaan dan lain-lain.

D. Pengembangan ciri khas Madrasah Unggul

Maksud pengembangan ciri khas keunggulan madrasah oleh penulis di sini adalah;

Pertama, Penguasaan dua bahasa Asing (bahasa Arab dan Inggris). Salah satu ciri khas yang dimiliki madrasah adalah adanya bidang studi bahasa Arab yang wajib dipelajari oleh peserta didik selain bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kenyataan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh madrasah untuk membuat suatu program unggulan dengan menitikberatkan pada bagaimana memfasilitasi siswa untuk menguasai bahasa asing bagi yang memiliki kemampuan atau bagi siswa yang memiliki bakat dan minat ke arah ini.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya, maka madrasah harus memiliki kesiapan dalam berbagai hal terutama pada; 1) Kesiapan asrama bagi siswa yang mengikuti program ini. Kesiapan asrama penting dalam rangka penciptaan lingkungan bahasa (biasa al-lughah) 2)

Kesiapan asrama bagi para ustazd dan utadzah yang akan membimbing mereka selama program ini berlangsung. 3) Kesiapan guru yang profesioanl dalam pembelajaran bahasa. 4 kesiapan dana baik untuk gaji guru maupun untuk biaya lain seperti biaya untuk proses pembelajaran, 5) Kesiapan sarana dan parasaran belajar seperti laboratorum bahasa.

Minimal ada tiga standar kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki siswa yang mengikuti program unggulan ini adalah; 1) Dapat menggunakan bahasa asing secara aktif dengan lisan. Hal ini berarti mereka harus bisa menggunakan bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) secara aktif dengan orang lain dengan benar, sekaligus dapat memahami dengan benar bahasa yang dikemukakan oleh *native speaker*. 2) Dapat memahami bahasa kitab atau bahasa buku. Hal ini berarti siswa memahami bahasa kitab yang tertulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan ilmu sharaf, balagah, dan nahwu sebagai sarananya, demikian halnya dengan bahasa Inggris. 3) Dapat membuat tulisan dengan menggunakan bahasa Arab sesuai kaidah insya. Hal ini berarti, mereka dapat mengungkapkan ide dan pemikirannya dalam tulisan yang menggunakan bahasa Asing.

Kedua, Pengembangan Program Paket Pilihan. (P4). Sementara yang dimaksud dengan pengembangan program paket pilihan adalah, madrasah menyiapkan sebuah paket yang di dalamnya terdiri dari berbagai program khusus yang dipersiapkan bagi siswa Madrasah Tsanwiyah dan Madrasah Aliyah yang tidak berniat untuk melanjutkan studi ke yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi). Program yang dimaksud adalah program yang sesuai dengan kebutuhan lokal di mana madrasah itu berada. Di antara program yang di maksud adalah: Pertama, Kewirausahaan seperti komputer, pengalengan ikan, menjahit, membuat kue, atau keterampilan lainnya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Intinya adalah keterampilan yang dapat secara langsung dimanfaatkan oleh siswa setelah lulus sekolah itu. Dengan program ini, maka siswa yang lulus sekolah dan tidak lagi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tentu dapat mencoba untuk membuka usaha sendiri dengan modal keterampilan yang di bekali.

Ketiga, Program da'i profesional. Masyarakat modern yang menghadapi berbagai persoalan hidup sangat membutuhkan siraman rohani dan pemahaman agama yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dibutuhkan da'i yang memiliki keahlian

dalam bidang dakwah, meskipun bukan pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan khusus untuk menjadi seorang da'i agama Islam yang profesional dalam menghadapi kondisi masyarakat yang terlilit oleh berbagai persoalan. Memang setiap umat Islam seharusnya memosisikan diri sebagai da'i, baik untuk diri, keluarga maupun masyarakatnya, akan tetapi da'i sebagai profesi dibutuhkan ilmu dan kemampuan khusus agar dalam menjalankan tugasnya lebih profesional, efektif dan optimal. Di antara kriteria da'i profesional adalah 1) menguasai ajaran agama Islam. 2) memahami bahasa Arab dengan baik 3) memiliki keahlian dalam membaca dan menulis Alquran dan hadis. 4) memiliki kemampuan berkomunikasi dan retorika, 5) mengetahui psikologi sosial dan lain-lain.

BAB 6

PERANAN KELUARGA, SEKOLAH/MADRASAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Cara bagaimana orang tua mendidik anaknya adalah mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar anaknya. Keluarga yang sehat besar artinya untuk memberikan pendidikan dalam ukuran yang kecil namun bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar, yaitu pendidik bangsa, negara dan dunia.

Dengan adanya intervensi dan kontribusi antara keluarga dan masyarakat, hal ini tentunya akan dapat

mendukung serta menunjang pembelajaran yang efektif di sekolah.

A. Peran Keluarga dalam Efektivitas Pembelajaran

Harapan dan keinginan setiap orang tua pada dasarnya adalah anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara sempurna, sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, dan berbudi luhur. Namun terkadang orang tua lupa bahwa keinginannya itu tidak akan terwujud tanpa kesungguhan usaha dan perjuangan dalam mencapainya. Karenanya, orang tua dituntut untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang menjadi kebutuhan anaknya. (Juwairiyah, 2010: 82) Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup (sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik serta pengakuan akan kewibawaan.

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan orang tuanya.

Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yakni melalui sekolah. (Hasbullah, 2013: 87).

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh orang tua kepada anak antara lain: a). Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. b). Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. c). Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. d). Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt, sebagai tujuan akhir hidup muslim (Arifin dalam Hasbullah, 2013: 88-89).

Point ke empat yang telah telah disebutkan di atas merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membina anak yang perlu dikembangkan secara kontinu sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat

dari orang tua, tetapi telah didasari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik anak yang tidak baik. Hal ini bisa terjadi ketika orang tua terlalu kasihan ketika harus memaksa anaknya untuk belajar, hingga akhirnya membiarkan anak tidak belajar. Jika hal ini terus dibiarkan berlarut larut, maka anak akan menjadi anak yang nakal, berbuat seenaknya dan semaunya. Begitupun ketika mendidik anak dengan cara yang terlalu keras dan ketat, hal ini pun juga cara yang salah dalam mendidik anak. Hal ini akan menimbulkan ketakutan dan akhirnya benci untuk belajar, bahkan akan berdampak pada gangguan kejiwaan jika hal itu semakin serius.

Orang tua yang demikian biasanya mengharapkan anaknya agar bisa meraih prestasi yang membanggakan. Disinilah bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang penting dalam upaya mengatasi kesukaran belajar yang dialami anak. Dengan demikian, keterlibatan orang

tua berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar anak. (Daryanto, 2013: 42).

Orang tua dalam sebuah keluarga mempunyai peran vital dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Bangkitnya semangat belajar anak merupakan peran besar yang harus disalurkan oleh keluarga, ini karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. Pembentukan watak, kepribadian, moral dan keilmuan adalah dibentuk dari rumah. Karenanya, orang tua harus menjadi mitra belajar anak di rumah. Menurut Sunardi, apabila orang tua menginginkan anaknya sukses, maka ia pun harus belajar, hal ini berarti orang tua harus meluangkan waktunya untuk siap menemani belajar anaknya. Di samping itu, sudah sewajarnya bagi orang tua untuk menyediakan sumber belajar bagi anak, mulai dari buku, majalah, kamus, koran dan alat belajar yang lain seperti komputer, meja belajar belajar, alat hitung, dan media belajar lainnya. Jika orang tua menghendaki untuk memberikan fasilitas seperti internet, HP, tablet dan sejenisnya kepada anaknya, maka orang tua harus berhati hati.

Orang tua harus mengawasi penggunaan barang-barang elektronik tersebut untuk menjaga moralitas, akuntabilitas, dan integritas anak. Maka akan lebih baik

jika orang tua menghindari untuk memberikan fasilitas yang bersifat mewah-mewah. Anak harus diberikan pengalaman menjalani pahitnya proses sebelum merasakan manisnya hasil. Jika anak selalu diberi manisnya hasil, maka anak tidak akan mendapatkan pelajaran bahwa perjuangan hidup itu penting. Hal ini yang akan mengakibatkan lahirnya generasi-generasi manja yang berbahaya bagi eksistensi mereka di masa depan yang akan berdampak pada mundurnya suatu bangsa. (Asmani, 2014: 188-189).

B. Kolaborasi Antara Sekolah/ Madrasah dan Keluarga

Di dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya.

Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah (pendidik) yang menggantikan

tugasnya selama di sekolah. Perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya harus diperhatikan. Begitu juga, orang tua harus menunjukkan kerjasamanya dalam mengarahkan kegiatan belajar anak di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumahnya, juga tidak membebani anak dengan tugas rumah tangga. Orang tua harus berusaha memotivasi dan membimbing anak dalam belajar. (Hasbullah, 2013: 89)

Pekerjaan guru akan lebih efektif ketika ia mengetahui latar belakang dan pengalaman anak didik di dalam keluarganya. Adanya kerja sama antara orang tua dan pendidik akan membantu dalam mengatasi anak didik yang kurang maju dalam pelajaran. Adapun cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerja sama antara keluarga dan dengan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Sekolah/Madrasah ke rumah anak didik

Pelaksanaan kunjungan ke rumah anak didik memiliki dampak yang positif, di antaranya: a) Menumbuhkan perasaan diperhatikan dan diawasi dari pihak sekolah. b) Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk melihat secara langsung cara anak didik dalam belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya serta penanganan dari keluarga. c) Hubungan semakin erat antara orang tua dan

dengan sekolah. d) Memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih transparan dan dapat bekerja sama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya. e) Adanya kesempatan pendidikan untuk mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui. f) Adanya timbal balik komunikasi dan informasi antara keluarga dan sekolah tentang keadaan anak didik. (Hasbullah, 2013: 91-92).

2. Hadirnya keluarga ke Madrasah/Sekolah

Adanya kegiatan di sekolah memberikan peluang kepada guru untuk bisa hadir ke sekolah, antara lain dalam kegiatan classmeeting, pengambilan raport, peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Selain dalam rangka memenuhi undangan dalam berbagai kegiatan tersebut, orang tua dapat berkonsultasi dan mencari informasi terkait dengan perkembangan anak didiknya di sekolah.

3. Adanya daftar nilai atau raport

Raport pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa, dan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, maka harus ada dukungan dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka

memperoleh informasi hasil belajar yang lengkap dan akurat. Laporan hasil belajar siswa mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Informasi ranah kognitif dan psikomotor diperoleh dari sistem penilaian yang digunakan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Informasi ranah afektif diperoleh melalui kuesioner, inventori, dan pengamatan yang sistematis. (Uno, 2011: 140). Pemberian raport yang diberikan oleh pihak sekolah kepada wali siswa, dapat mendukung kuantitas kehadiran wali siswa datang ke madrasah. Adanya raport maka wali siswa akan mengetahui hasil belajarnya. Dengan hadirnya wali siswa ke sekolah akan memudahkan guru mencari informasi terkait dengan kegiatan dan kesibukan serta aktivitas siswa di rumah. Begitupun sebaliknya, wali siswa dapat bertanya jawab dan mengetahui informasi tentang perkembangan dan keadaan anaknya di sekolah.

C. Hubungan Masyarakat dan Sekolah/Madrasah

1. Bentuk kehidupan masyarakat

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap belajar siswa. Jika dalam kehidupan suatu masyarakat terdiri terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai

kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini akan berdampak buruk pada siswa yang berada disana. Anak akan tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya.

Hal ini akan berakibat pada terganggunya belajar siswa dan bahkan akan kehilangan semangat belajarnya karena perhatiannya berpindah pada perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan orang-orang di sekitarnya.

Sebaliknya, jika lingkungan tempat anak tinggal adalah orang terpelajar yang berperilaku baik, yang mendidik dan menyekolahkan anaknya, antusias dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, maka anak akan terpengaruh juga pada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, sehingga akan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan masyarakatnya. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat siswa untuk belajar lebih giat lagi. Karenanya, sangat perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak/ siswa, sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. (Daryanto, 2013: 450).

Masyarakat sebagai orang yang sangat merasakan hasil dari pendidikan, hendaknya ikut aktif berpartisipasi

dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Hal ini karena, apabila kemampuan dan keterampilan anak didik berkembang, masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya. Dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pembelajaran yang efektif adalah sebagai wujud dari peran yang bisa dilakukan masyarakat.

Sumber daya yang dimaksud adalah segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, misalnya sarana prasarana, dan finansial. Masyarakat bisa bekerja sama dengan sekolah dalam penguatan sumber ekonomi. Sekolah diajak untuk memiliki alternatif lain selain bantuan dari pemerintah, misalnya dengan aktif berwirausaha supaya mandiri dan bisa memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan. Di samping itu, masyarakat dapat berperan sebagai narasumber bagi sekolah dalam memberikan informasi yang berguna dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, misalnya narasumber dari aspek respons publik, efektivitas strategi yang diterapkan, dan masukan-masukan konstruktif dan progresif bagi peningkatan kualitas guru dan program sekolah.

Diperlukan juga adanya pertemuan rutin antara sekolah dan masyarakat sebagai ajang artikulasi dan ekspresi, untuk menyampaikan pendapat, aspirasi,

gagasan, ide, pemikiran dan hal-hal lain yang bisa mendorong kebersamaan, kemajuan, dan kepedulian sosial. (Asmani, 2014: 186-187). Berinteraksi dengan lingkungan adalah upaya untuk mengambil peluang-peluang yang ada dan menciptakan peluang yang akan datang serta belajar berpartisipasi aktif secara lebih baik. (Hamid, 2011: 82-83).

2. Keterlibatan masyarakat dan sekolah

Masyarakat dan pendidikan, keduanya mempunyai keterkaitan dan saling berperan. Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa hubungan antar sekolah (pendidikan) dengan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua segi berikut: a) Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. b) Fungsi pendidikan di sekolah sedikit banyak dipengaruhi pula oleh corak pengalaman seseorang di lingkungan masyarakat.

Perbedaan pengalaman di dalam pergaulan masyarakat, jenis bacaan yang dikonsumsi serta aktivitas-aktivitas lain di tengah masyarakat kesemuanya membawa pengaruh terhadap fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah terhadap diri seseorang. Nilai dari semua aktivitas tersebut berpengaruh terhadap fungsi pendidikan di sekolah. Karenanya, sekolah

berkepentingan terhadap perubahan lingkungan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini pun juga sebaliknya, kesadaran untuk berpartisipasi dari seseorang ditentukan oleh tugas-tugas belajar serta pengarahan belajar yang dilancarkan di sekolah.

3. Fungsional Pendidikan di Sekolah/Madrasah

Definisi sumber belajar sebagaimana yang diungkapkan oleh AECT berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. (Daryanto, 2013: 60-61). Banyaknya sumber belajar di masyarakat, seperti perpustakaan umum, museum, kebun binatang, peredaran koran dan majalah dan sumber belajar lainnya disamping berfungsi sebagai medium pendidikan bagi masyarakat luas, juga berfungsi pula untuk didayagunakan bagi fungsi pendidikan persekolahan.

Pendayagunaan sumber belajar di masyarakat bagi kepentingan fungsi pendidikan di sekolah peningkatannya bisa dilakukan dengan jalan penentuan strategi belajar mengajar yang mengaktifkan keterlibatan mental siswa di dalam mengkaji sumber-sumber belajar di lingkungannya. Sebaliknya, gerakan pendidikan yang diorganisasi di

tengah-tengah masyarakat, penunai fungsi dan pendidikan di masyarakat itu juga bisa dan fungsional jika mendayagunakan sumber-sumber sekolah yang berupa guru, gedung, serta perlengkapan lainnya.

- a. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Masyarakat dan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.
- b. Sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan masyarakatnya, sekolah membawa konsekuensi-konsekuensi konseptual dan teknis sehingga berkesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan apa-apa yang dibutuhkan masyarakatnya.
- c. Akurasi sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga atau organisasi persekolahan, akan ditentukan pula oleh kejelasan formulasi kontrak antara sekolah (selaku pelayan) dengan masyarakat selaku pemesan
- d. Penuaian fungsi sekolah sebagai pihak yang dikontrak untuk melayani pesanan-pesanan pendidikan oleh masyarakatnya, hal ini tentunya

akan dipengaruhi oleh ikatan-ikatan objektif di antara keduanya.

4. Masyarakat dalam pendidikan

Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik di jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Karenanya, bahan yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi penerus bangsa harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dimana kegiatan pendidikan berlangsung. Adapun beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai berikut: (Hasbullah, 2013: 100-101).

- a. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
- b. Masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
- c. Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar, seperti gedung museum,

perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan sebagainya.

- d. Masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolah. Di dalam masyarakat, banyak orang-orang yang mempunyai keahlian khusus seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter dan sebagainya. Berbagai macam profesi tersebut dapat dijadikan sebagai narasumber dalam suatu kegiatan workshop/ seminar dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik.
- e. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Peran masyarakat disini adalah memberikan bahan pelajaran dalam wujud aspek alami industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Dengan mengacu pada hal di atas, nampak jelas bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar terhadap pendidikan sekolah. Karenanya, sekolah perlu memanfaatkan sebaik-baiknya peran dari masyarakat, dengan pertimbangan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan melihat realita dalam masyarakat, anak didik akan mendapatkan pengalaman langsung

sehingga mereka dapat memiliki pengalaman yang konkret dan lebih mudah untuk diingat.

- b. Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat.
- c. Banyak sumber pengetahuan di masyarakat yang belum diketahui oleh guru.
- d. Pada kenyataannya, antara masyarakat dan sekolah keduanya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.

Adanya keterlibatan siswa dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat akan menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Namun ketika keterlibatan siswa dalam kegiatan masyarakat terlalu padat, seperti berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lain maka akan mengganggu belajarnya. Lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktu, maka belajarnya akan semakin terbengkalai dan terlupakan. Dengan demikian, membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat sangatlah perlu, hal demikian agar tidak sampai mengganggu belajarnya. Namun demikian, kegiatan yang mendukung belajar seperti kursus, PKK Remaja, kelompok diskusi dan semisalnya tidaklah menjadi masalah. (Daryanto, 2013: 49).

5. Pembelajaran yang efektif

Pembelajaran adalah suatu upaya untuk membelajarkan siswa. Secara implisit, dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. (Uno, 2011: 2) Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran maka akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas dan kreativitas yang ada dalam diri peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pada prinsipnya, pembelajaran adalah menekankan pada aktivitas peserta didik.

Adapun menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadilah proses belajar. Sedang definisi pembelajaran yang diungkapkan oleh Nata adalah suatu usaha dalam membimbing peserta didik dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar untuk belajar. Jadi pada intinya pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan

peserta didik yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. (Fathurrohman, 2012: 6-7).

Penyelenggaraan dalam pembelajaran merupakan salah satu tugas utama seorang guru, namun demikian diperlukan intervensi antara keluarga dan juga masyarakat dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Maksud yang terkandung di dalam kegiatan pembelajaran adalah agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Aspek penting yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar berupa perubahan tingkah laku pada diri siswa dan proses hasil belajar berupa sejumlah pengalaman intelektual, emosional dan fisik pada diri siswa.

Pembelajaran juga berarti meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif (daya pikir), afektif (tingkah laku), dan psikomotor (keterampilan siswa). Kemampuan-kemampuan tersebut dikembangkan bersama dengan perolehan pengalaman-pengalaman belajar. Dengan demikian, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam membelajarkan siswa yang dinilai dari perubahan perilaku dan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman pada diri siswa. (Fathurrohman, 2012: 7-8).

Kreativitas siswa hanya akan terwujud melalui pembelajaran yang kreatif, yakni pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran yang kreatif. Jerry Wennstrom mengatakan bahwasanya proses kreatif adalah suatu format eksplorasi yang berbeda dari yang lain, yakni proses yang dihubungkan dalam pengalaman hidup. Proses pembelajaran kreatif adalah suatu tindakan penemuan yang dilakukan secara terus-menerus, penggalian yang mendalam dengan hati, pikiran dan semangat untuk mendapatkan keindahan dan pengalaman baru yang dapat ia rasakan. Proses belajar dikatakan kreatif jika dilihat dari pelaku belajar itu sendiri, dan bukan dilihat dari orang lain. Karenanya, keindahan dan pengalaman baru tersebut hanya bisa dirasakan oleh siswa itu sendiri. Dengan demikian, proses kreatif antara siswa yang satu dengan yang lainnya berada pada takaran yang berbeda-beda. (Asmani, 2014: 88).

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran merupakan suatu proses belajar. Dalam proses pembelajaran, seorang individu melakukan kegiatan belajar. Sedangkan dalam belajar, seorang individu harus mampu mengadakan perubahan tingkah laku. Perubahan yang diharapkan dalam pembelajaran adalah perubahan yang lebih baik

dari sebelumnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komponen yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran yakni: sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik, proses yang terjadi dalam kegiatan belajar dan hasil dari kegiatan belajar. (Fathurrohman, 2012: 11).

6. Peranan seluruh *stakeholder* dalam menunjang pembelajaran yang efektif

Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan, dengan adanya tujuan maka hal yang kita inginkan akan bisa tercapai. Tujuan merupakan cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Sebagai unsur penting dalam suatu kegiatan, maka dalam kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan.

Demikian juga halnya dengan dengan kegiatan pembelajaran, tujuan adalah suatu cita-cita yang hendak dicapai dalam kegiatannya. Tidak ada pembelajaran yang diprogramkan tanpa tujuan, jika tidak memiliki tujuan maka kegiatan tersebut tidak memiliki kepastian dalam menentukan arah, target terakhir dan prosedur yang dilakukan. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan tentang perubahan perilaku apa yang akan diperoleh setelah proses pembelajaran. Jika tujuan diketahui, maka siswa mempunyai motivasi untuk belajar. Karenanya,

agar tujuan pembelajaran mudah diketahui, maka harus dirumuskan secara khusus.

Pada intinya, pembelajaran adalah suatu proses transfer ilmu (Chatib, 2012: 135) dimana tujuannya adalah terciptanya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa adanya usaha yang serius dari semua orang yang terlibat dalam proses tersebut, baik dari orang yang belajar maupun orang yang mengajar. (Fathurrohman, 2012: 13). Dalam hal ini, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai jika ada keterlibatan antara semua pihak, baik sekolah, keluarga dan masyarakat.

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Abdorakhman Gintings menjelaskan, tujuan pembelajaran harus ditetapkan sebelum proses belajar dan pembelajaran berlangsung agar guru sebagai pengemudi dan siswa sebagai penumpang memahami apa perubahan tingkah laku yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Jika tujuan pembelajaran tidak ditetapkan terlebih dahulu, maka ibarat bus atau mobil yang berjalan tanpa tujuan, pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam menetapkan rumusan tujuan pembelajaran pun harus jelas, yakni bagaimana seharusnya peserta didik

berperilaku pada akhir pembelajaran. (Fathurrohman, 2012: 13).

Pembelajaran yang efektif merupakan salah satu tujuan yang diharapkan dan diprioritaskan dalam proses pembelajaran. Pendapat yang dikemukakan oleh Fred Percival dan Henry Ellington memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang dapat dicapai sebagai hasil belajar. (Uno, 2011: 35). Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dikelola sedemikian rupa sehingga dengan input yang ada dan proses belajar yang dikelola dapat dicapai hasil seoptimal mungkin. Dilihat dari kegiatan siswa, pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat membuat siswa terdorong dan mampu memanfaatkan kesempatan belajar yang ada untuk menguasai kompetensi yang dipelajari. Adapun jika ditinjau dari kegiatan guru, pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menuntut guru agar memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa agar membangun kompetensinya. (Aqib, 2009: 22).

Menurut Gagne, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Informasi verbal, yakni penguasaan informasi dalam

bentuk verbal baik secara tertulis maupun tulisan. b) Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol. c) Strategi kognitif, yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran. d) Sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih jenis tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa, di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak. e) Kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. (Hamdani, 2010: 68).

Efektivitas sekolah berarti memaksimalkan segenap potensi dan peluang yang tersedia dalam upaya menghasilkan sesuatu secara optimal. Selaras dengan makna dasar efektif, dengan menjalankan efektivitas,

sekolah diharapkan dapat menjadi semakin bermutu, berkualitas dan mencerahkan. (Naim, 2010: 240). Karenanya, Tiga elemen utama pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis demi sukses dan terwujudnya pembelajaran yang efektif. Jangan sampai satu di antara ketiga elemen pasif, bahkan pasif ketiga-tiganya. Dibutuhkan forum secara kontinu untuk mempertemukan ketiga elemen ini agar setiap persoalan yang muncul bisa dimusyawarahkan secara bersama untuk menemukan solusi terbaik.

BAB 7

TUGAS DAN PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Kegiatan Guru Merencanakan Kurikulum

Kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang sistematis dan memadai. Melalui perencanaan diharapkan dapat memperkirakan tentang apa-apa yang hendak diwujudkan sewaktu proses belajar-mengajar terjadi. Adapun perencanaan ini meliputi: menentukan tujuan pengajaran, menentukan bahan pelajaran, menentukan metode dan alat pengajaran dan merencanakan penilaian pengajaran.

Langka pertama yang harus ditempuh guru dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menentukan tujuan yang ingin di capai setelah pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dapat memberi pedoman terhadap apa yang akan

dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Tujuan dapat digunakan sebagai patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan tersebut dicapai.

Tujuan ini merupakan suatu pokok bahasan yang spesifik yang merupakan hasil proses pembelajaran. Tujuan pengajaran ini mengandung muatan yang menjadi bahan pelajaran. Bloom mengklasifikasikan tujuan tersebut ke dalam tiga ranah besar, yaitu : kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan ini bersumber dari kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat, Tujuan pengajaran perlu ditentukan dan dirumuskan dengan baik dan benar. Dalam hal ini Taba memberikan beberapa petunjuk tentang cara merumuskan tujuan pengajaran, yaitu: a) tujuan hendaknya mengandung unsur proses dan produk, b) bersifat spesifik dan dinyatakan dalam bentuk perilaku. c) mengandung pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. d) pencapaian tujuan kadang kala membutuhkan waktu relatif lama. e) harus realistis dan dapat dimaknai sebagai kegiatan atau pengalaman belajar tertentu. dan f) bersifat komprehensif atau meliputi semua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan.

Langkah kedua, dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menetapkan bahan pelajaran.

Bahan pelajaran berkenaan dengan menjawab pertanyaan yaitu apa yang akan diajarkan? Bahan pelajaran merupakan isi kurikulum yang diberikan kepada anak didik sewaktu berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam hal ini guru perlu memahami bahan pelajaran terlebih dahulu sebelum diajarkan ke anak didik.

Bahan pelajaran yang ingin disajikan kepada anak didik dirancang dan diorganisir dengan baik. Nasution mengemukakan bahwa organisasi kurikulum sebagai pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid. Ada beberapa jenis organisasi kurikulum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yaitu (a) organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, (b) organisasi kurikulum berdasarkan kebutuhan anak didik, (c) organisasi kurikulum berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Langkah ketiga, dalam merencanakan proses pengajaran adalah menentukan metode mengajar. Menentukan metode mengajar erat kaitannya dengan pemilihan strategi belajar mengajar yang paling efisien dan efektif. Pemilihan strategi yang tepat ini diperlukan dalam rangka mempersiapkan kegiatan proses belajar mengajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Ada beberapa pertimbangan yang perlu

diperhatikan dalam memilih metode mengajar, yaitu : (a) tujuan pengajaran yang ingin dicapai, (b) bahan pelajaran yang akan diajarkan (c) jenis belajar anak didik yang diinginkan.

Langkah terakhir dalam merencanakan proses belajar adalah merencanakan evaluasi atau penilaian pengajaran. Pada dasarnya penilaian adalah suatu proses menentukan nilai dari suatu objek atau peristiwa dalam konteks situasi tertentu.

B. Kegiatan Guru Melaksanakan Kurikulum

Setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah mewujudkan terhadap apa-apa yang telah direncanakan. Kegiatan ini disebut juga dengan melaksanakan proses belajar-mengajar. Perbuatan guru dalam mengajar ini akan mewarnai setiap langkah yang membentuk proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yaitu: tahap pemula, tahap pengajaran, tahap penilaian dan tindak lanjut. Tahap pemula adalah tahap yang bertujuan menyiapkan anak dan kondisi belajar yang dapat memudahkannya menerima pelajaran. Tahap pengajaran merupakan tahapan yang

membahas materi yang lebih disiapkan guru. Sedangkan tahapan penilaian dan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajaran.

C. Kegiatan Guru Menilai Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum yang telah dilakukan guru perlu diadakan penilaian atau evaluasi. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap komponen-komponen kurikulum. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku.

Guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah sebaiknya melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakannya. Kegiatan terbaik bagi guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah adalah melakukan evaluasi kurikulum secara terus menerus dan bersifat menyeluruh. Penilaian kurikulum ditujukan pada kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana, kurikulum sebagai proses, sebagai hasil, tujuan pengajaran, bahan pelajaran, kualitas guru, kualitas siswa, sarana dan prasarana pengajaran dan lain-lain.

Pendekatan dan teknik penilaian ini beragam sesuai dengan sasaran, fungsi, dan tujuan penilaian. Untuk menilai dimensi kuantitatif, misalnya hasil belajar siswa dapat digunakan teknik penilaian berupa tes-tes standar. Sedangkan untuk dimensi kualitatif dapat dipergunakan melalui observasi, wawancara, dan lain lain.

BAB 8

KURIKULUM MADRASAH DINIYAH DI KALIMANTAN SELATAN

A. Kurikulum Madrasah Diniyah Jenjang Awwaliyah

Pendidikan pada Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, terutama untuk jenjang awwaliyah. Ada yang melaksanakannya dalam kurun waktu 4 tahun, dan ada pula yang melaksanakannya dalam kurun waktu 6 tahun. Dari sisi penamaan kelas atau rombongan belajar, untuk Madrasah Diniyah yang lama belajarnya 6 tahun, maka kelas terdiri dari kelas I sampai dengan kelas VI. Sementara penamaan kelas untuk lama belajar 4 tahun, maka ada Madrasah Diniyah yang menamakannya kelas I sampai dengan kelas IV, ada pula yang menamakannya kelas III sampai dengan kelas VI. Sedangkan untuk Madrasah Diniyah Wustha, lama belajarnya adalah 3 tahun, dari kelas I sampai dengan kelas III.

Secara umum, kompetensi lulusan Madrasah Diniyah terbagi ke dalam 3 (tiga) asepek, yaitu:

1. Pengetahuan (kognitif), dengan indikator: a. Mempunyai pengetahuan tentang ajaran Islam secara lebih luas; b. Mempunyai pengetahuan Bahasa Arab secara lebih luas sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.
2. Pengalaman (psikomotorik), yaitu: a. Mengamalkan ajaran Islam yang ditunjukkan dengan pengalaman ibadah dan akhlakul karimah; b. Kemampuan belajar dengan cara yang baik; c. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan di masyarakat; d. Mampu menggunakan bahasa Arab dan membaca serta memahami kitab berbahasa Arab; e. Mampu memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.
3. Sikap dan akhlak (afektif), yaitu: a. Mencintai dan taat terhadap agama Islam dan bertekad untuk menyebarkanluaskannya; b. Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam; c. Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia, bangsa

serta lingkungan sekitarnya; d. Mencintai ilmu pengetahuan dan semangat untuk memperdalamnya; e. Terbiasa disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku; f. Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal; g. Menghargai waktu, bersikap hemat dan produktif. Keseluruhan kompetensi tersebut di atas akan didapatkan oleh santri setelah mereka mengikuti berbagai mata pelajaran yang diprogramkan di Madrasah Diniyah pada setiap jenjangnya.

Di bawah ini akan dipaparkan nama mata pelajaran, kitab yang digunakan dan nama pengarang, dari kelas I sampai dengan kelas VI Madrasah Diniyah Awwaliyah, dan dari kelas I sampai dengan kelas III Madrasah Diniyah Wustha.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kurikulum yang digunakan pada Madrasah Diniyah di Kalimantan selatan ada yang berasal dari Kementerian Agama, dan ada pula yang dibuat oleh madrasah itu sendiri dengan mengadopsi kurikulum pesantren. Dari 20 madrasah yang diteliti, 4 madrasah di antaranya menggunakan kurikulum Kementerian Agama, seperti Madrasah Diniyah Majaligus Saniyah dan Madrasah

Diniyah Al Ma"arif Baiturrahim di Kabupaten Barito Kuala, serta Madrasah Diniyah Damanhuri dan Madrasah Diniyah Al-Hidayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kebanyakan Madrasah Diniyah menggunakan kurikulum sendiri.

Mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum ini adalah al-Qur'an- Hadits, Fiqih/Ibadah Syariah, Aqidah-Akhlak, SKI/Tarikh, dan Bahasa Arab. Semuanya menggunakan buku paket Kementerian Agama berbahasa Indonesia dari kelas I sampai dengan kelas IV. Untuk memperkuat hasil pembelajaran, santri juga diajarkan Ad'iyah (diambil dari hadits-hadits Nabi Muhammad saw), Khat, Bahasa Arab Melayu (memakai buku Sifat Dua Puluh), Imla, Mahfudzat, Nahwu, Sharaf, Tajwid, Muthalaah, hapalan surah-surah pendek, bacaan-bacaan shalat, dan diajarkan pula Buku Iqra jilid 1 – 6.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mata pelajaran pokok yang diberikan dalam kurikulum ini meliputi Pendidikan Agama Islam (al-Qur'an-Hadits, Fiqih/Ibadah Syariah, Aqidah-Akhlak, SKI/Tarikh), Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, dan Muthala'ah), dan muatan penunjang seperti Imla dan Mahfudzat. Sebagaimana halnya kurikulum Kementerian Agama, Madrasah Diniyah yang menggunakan kurikulum sendiri secara garis besar

juga mengajarkan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan penunjang. Mata pelajaran, kitab yang digunakan, dan nama pengarang kitab yang diajarkan untuk jenjang Awwaliyah dapat dilihat pada Sub Bab berikutnya.

B. Kelompok Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Jenjang Awwaliyah

Kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri dari al-Qur'an, Tajwid, Hadits, Tauhid, Akhlak/Adab, Fiqih, dan Tarikh.

1. Al-Qur'an. Umumnya Qur'an diajarkan dari kelas I sampai dengan kelas VI dengan menggunakan Qur'an Juz Amma untuk kelas I dan II, dan Qur'an lengkap 30 juz untuk kelas III sampai dengan kelas VI. Di samping diajarkan al-Qur'an, santri juga diajarkan menghafal beberapa surah dari al-Qur'an, seperti surah Yasin, surah al-Waqi'ah, Surah al-Muluk, dan surah as-Sajdah. Tujuan utama mempelajari al-Qur'an adalah mencintai dan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dengan berpedoman kepada al-Qur'an, maka akan didapat kemudahan, keselamatan. dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian al-Qur'an ini harus menjadi basis aktivitas para santri dalam menata hidupnya di kemudian hari, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya.

2. Tajwid. Pelajaran ini dimaksudkan untuk memperbagus bacaan al-Qur'an, dengan mengenali, memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Orang yang menguasai ilmu tajwid dan dapat menerapkannya ketika membaca al-Qur'an, tentu bacaannya akan sesuai dengan *makharijul huruf* (tempat keluarnya huruf) dan enak di dengar oleh orang lain. Adapun kitab Tajwid yang diajarkan adalah Tajwid Melayu dan Tajwidul Qur'an, dua-duanya karangan H.M. Kasyful Anawar, Hidayatus Shibyan karangan Syekh Sa'id bin Sa'ad, Tarjamah Hidayatush Shibyan karangan Kiayi Radin Abdul Majid, Hidayatul Mustafid karangan Said Muhammad Mahmud, Risalah Ilmu Tajwid karangan H. Muhammad Qusyairi Hamzah, Hidayatush Shibyan karangan Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan, dan Kitab at-Tajwid karangan Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Burhan.
3. Hadits. Mata pelajaran ini diberikan agar santri mampu membaca, menulis, menghafal, memahami

dan mengamalkan matan beberapa hadits yang berkaitan dengan iman dan amal shaleh, serta mencintai dan menjadikan sunnah yang tertuang di dalam hadits-hadits Nabi saw. sebagai pedoman hidup. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah saw yang mengajarkan agar umat Islam berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah beliau. Sunnah Rasulullah ini bisa didapat melalui kitab-kitab hadits. Adapun Kitab yang digunakan di Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut: At-Tarbiyah karangan Ponpes Darussalam, Al-Arba'in an-Nawawiyah karangan Syekh Imam Nawawi, At-Targhib wat-Tarhib karangan Syekh Husin Mathar, dan Abi Jamrah karangan Syekh Muhammad Ali asy-Syafi'i.

4. Tauhid. Mata pelajaran Tauhid dimaksudkan agar santri dapat memahami dan meyakini rukun iman dengan pembuktian dalil naqli dan dalil aqli. Dengan demikian santri bisa mendapatkan aqidah yang benar yakni aqidah ahlussunnah wal jamaah, dan tidak tergelincir kepada aqidah yang sesat yang banyak berkembang di masyarakat. Pelajaran Tauhid diajarkan dari kelas I sampai dengan kelas VI dengan berbagai macam kitab sebagai berikut: Aqidatul Awam, Risalataut Tauhid (Arab Melayu) karangan H.

M. Kasyful Anwar, Aqidah Islamiyah karangan Syekh Imam Bashri, Matan al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri, Matan Sanusiyah, Matan Jauharatut Tauhid karangan Syekh Ibrahim al-Laqani, Tijan al-Darari, Syarah Tijan al-Darari karangan Syekh Imam Nawawi, Aqa'idud Diniyyah karangan Syekh Abdurrahman Assaqaf, Khamsah Mutun karangan beberapa orang ulama (Ibrahim al-Bajuri, Ibrahim al-Laqani, Muhammad bin Yusuf as-Sanusi, Ahmad Dardir, dan Syekh Syaibani), dan At-Targhib wat Tarhib karangan beberapa orang ulama (Syekh Hasan Bathar, Syekh Abdullah Mamduh, Said Muhammad Thahir, Syekh Ahmad Nadhirin, Syekh Muhammad Thayyib, Said Muhammad Marzuqi, dan Syekh Muhammad 'Atha).

5. Akhlak/Adab. Mata pelajaran ini diberikan untuk membiasakan santri dalam pengamalan akhlak mulia dan adab Islami serta menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari. Hal ini sesuai dengan misi diutusny Nabi Muhammad saw. yakni untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kitab yang diajarkan adalah sebagai berikut: Pelajaran Adab (dibuat oleh guru sendiri), Al-Akhlaq lil Banin jilid 1, 2, 3 karangan Syekh Umar bin Ahmad Barja, Washaya al-Aabaa lil-Abna karangan Syekh Muhammad Syakir,

Washaya at-Tahliyah, dan At-Tarbiyah wal Adabus Suariya karangan Abdurrahman Effendi Ismail.

6. Fiqih. Pelajaran Fiqih dimaksudkan agar santri mengenal, memahami pokok-pokok rukun Islam serta ketentuan pelaksanaannya. Di samping itu mampu melaksanakan hukum-hukum Islam secara benar, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku/kitab yang digunakan adalah sebagai berikut: Risalatul Fiqih karangan H. M. Kasyful Anwar, Matan Sittin karangan Syekh Ramli, Syarah Sittin Masalah karangan Syekh Ramli, Mabadiul Fiqhiyyah 1, 2, 3 karangan Umar Abdul Jabbar, dan Matan al-Ghayah Wat-Taqrub karangan Syekh Ishak.
7. Tarikh. Pelajaran Tarikh diberikan agar santri mengenali, mengidentifikasi, meneladani, dan mengambil ibrah dari sejarah Arab pra-Islam, sejarah Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin, serta perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Dengan demikian tertanam dalam diri santri apa yang harus dipetik dan diteruskan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dan apa yang harus ditinggalkan atau dibuang jauh-jauh agar tidak terulang kembali. Kitab yang digunakan adalah sebagai berikut: Risalah Mata Pelajaran Tarikh (Arab Melayu) karangan

Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Riwayat Nabi Muhammad saw (Arab Melayu) karangan Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Sirah Sayyidil Mursalin karangan H.M. Kasyful Anwar, dan Khulashah Nurul Yaqin 1, 2, 3 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar.

C. Kelompok Mata Pelajaran Bahasa Arab Jenjang Awwaliyah

Mata pelajaran Bahasa Arab diberikan dengan maksud agar santri mampu membaca, menulis dan memahami bahasa Arab dengan baik dan benar serta mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Arab secara fasih. Kelompok mata pelajaran Bahasa Arab terdiri dari:

1. Nahwu. Kitab yang digunakan adalah: Al-Ajrumiyah karangan As-Shunhaji, Ilmun Nahwi karangan Syekh Ismail Abi Bakar, Mukhtashar Jiddan karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Asy-Syekh Khalid karangan Syekh Khalid, dan Is"afut Thalibin karangan H.M. Syukri Unus.
2. Sharaf. Kitab yang digunakan adalah: Durusut Tashrif jilid 1, 2, 3, 4 karangan H. M. Kasyful Anwar.
3. Lughah/ Bahasa Arab. Kitab yang digunakan adalah: Ta'limul Lughah karangan Syekh Umar Abdul Jabar.

Lughatut Takhatub karangan Umar Abdul Jabbar, Muhadatsatul Yaumiyyah karangan Muhammad Qari Abdul Kadir, al-Qiraatur Rasyidah karangan Umar Abdul Jabbar.

D. Kelompok Mata Pelajaran Penunjang Jenjang Awwaliyah

Kelompok mata pelajaran penunjang terdiri dari:

1. Hijaiyah dan Kitabah. Ini adalah pelajaran cara membaca dan menulis huruf Arab yang diajarkan di kelas I dan II dengan menggunakan Kutubul Hijaiyah dan Kutubul Kitabah karangan Zaini Umar.
2. Khat/kaligrafi. Pelajaran ini dimaksudkan melatih santri yang memiliki minat dan potensi besar untuk menulis huruf Arab secara artistik/indah. Buku yang digunakan adalah buku pegangan guru untuk kelas V dan kelas VI.
3. Ad'iyah. Yang diajarkan di sini adalah do'a-do'a, dari kelas I sampai dengan kelas II dengan menggunakan

kitab Risalah al-Ad'iyah wal Azkar karangan H. Abdullah Jamal al-Banjary.

4. Mahfudzat. Pelajaran ini berisi kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah yang mengandung makna dan pembelajaran bagi santri. Kitab yang digunakan adalah al-Muntakhabat 1 dan 2 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar.

E. Kurikulum Madrasah Diniyah Jenjang Wustha

Untuk Madrasah Diniyah jenjang wustha, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dibuat sendiri oleh Madrasah Diniyah. Dengan kata lain mereka tidak menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum ini merupakan lanjutan dari Madrasah Diniyah jenjang Awwaliyah. Sekalipun demikian, beberapa mata pelajaran dasar yang diajarkan pada jenjang awwaliyah sudah tidak diajarkan lagi di jenjang Wustha seperti Qur'an, Hijaiyah dan Kitabah, Khat, dan hapalan surah-surah pendek. Sebaliknya, muatan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab lebih diperdalam lagi, sehingga kompetensi santripun akan lebih luas dan lebih meningkat.

Dengan demikian hanya ada dua kelompok besar mata pelajaran pada jenjang Wustha. Pertama, kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kedua, kelompok mata pelajaran Bahasa Arab seperti yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

F. Kelompok Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Jenjang Wustha

Kelompok mata pelajaran yang diajarkan untuk kelompok Pendidikan Agama Islam meliputi:

1. Tauhid. Kitab yang digunakan adalah Kifayatul Awam karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri, Hud Hudi karangan Syekh Abdullah asy-Syarqawi, dan Kasyful Asrar karangan Syekh Abdul Mu'thi, Tuhfatul Raghabin (Syarah Jauharatut Tauhid) karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri.
2. Fiqih. Kitab yang digunakan adalah Fathul Qarib karangan Syekh Muhammad bin Qasim, Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malisari, Bajuri juz 1 dan 2 karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri, dan l'anatut Thalibin.
3. Ushul Fiqih. Mata pelajaran ini dimaksudkan untuk bisa memahami istinbath hukum yang terdapat

dalam kitab-kitab Fiqih. Kitab yang digunakan adalah Ilmu Ushul Fiqih, *Alatun Fi Ushulil Fiqh*, Risalah Ushul Fiqih karangan Syekh Abi Ya'kub, *Madkhalul Wushul* karangan Sayyid Muhsin al-Musawi, dan *Syarhul Waraqat* karangan Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyathy.

4. Faraidh. Mata pelajaran ini berisi petunjuk bagaimana cara membagi harta warisan kalau seseorang sudah meninggal dunia secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Kitab yang digunakan adalah *An-Nafhatul Hasaniyyah* karangan Sayyid Muhsin bin Ali al-Masawi, *at-Tuhfatul Hasaniyah* karangan Syekh Hasan al-Masyath, *Takmilah Zubdatil Hadits* karangan Said Muhammad Salim bin Hafidz.
5. Akhlak. Kitab yang digunakan adalah *Ta'limul Muta'allim* karangan Syekh Ibrahim bin Ismail, *Risalatul Mu'awanah* karangan Imam Syekh Abdullah bin Alawy al-Haddad al-Hadhramy asy-Syafi'i, *Maraqil al-Ubudiyyah* karangan Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Syarah Bidayatul Hidayah Maraqil al-Ubudiyyah*, *Kifayatul Atqiya* karangan Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathy, *at-*

Tarbiyah wat Tahzib karangan Syekh Said Muhammad.

6. Tafsir. Mata pelajaran ini dimaksudkan agar santri tidak hanya pandai membaca al-Qur'an, tetapi juga dapat memahami tafsirnya sehingga kandungan makna ayat yang dibaca bisa lebih dalam dan bermanfaat dalam kehidupan. Kitab yang digunakan adalah Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Sayuthy.
7. Ushul Tafsir. Pelajaran ini diberikan untuk memudahkan santri dalam mempelajari dan memahami tafsir al-Qur'an. Kitab yang digunakan adalah Risalah Fi Ilmit Tafsir, Qaulul Minir karangan Syekh Ismail Usman, Durus Ilmit Tafsir, Risalatani karangan Syekh Hasan Muhammad al-Masyath, Ilmu Ushul Tafsir karangan Usman Zainul Yamani al-Makky, Ilmu Ushul Tafsir karangan Syekh Jalaluddin as-Sayuthy.
8. Hadits. Kitab yang digunakan adalah Abi jamrah karangan Muhammad bin Ali asy-Syafi'i, Riadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafunnawawi ad-Dimsyiqy. Tajridus Sharih,

Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalany.

9. Ushul Hadits. Mata pelajaran ini diberikan agar para santri dapat mempelajari dan memahami hadits-hadits Nabi saw. secara benar dan mendalam. Kitab yang digunakan adalah An-Nafhatul Hasaniyah Karangan Sayyid Muhsin bin Ali al-Masawi, Tanwirut Thullab karangan H.M. Sya'rani, Matan Baiquniyah karangan Abu Ishak al-Ilbiry al-Andalusy, Syarah Baiquniyah karangan Hasan Muhammad al-Masyath. Taqriratus Saniyyah karangan Abu Ishak al-Ilbiry al-Andalusy.
10. Tarikh. Kitab yang digunakan adalah Nurul Yaqin karangan Muhammad Khudari Bek, Muhammad Rasulullah karangan Syekh Muhammad Ridha.

G. Kelompok Mata Pelajaran Bahasa Arab Jenjang Wustha

Kelompok mata pelajaran Bahasa Arab meliputi:

1. Nahwu. Kitab yang digunakan adalah Kawakibud Durriyyah (Mutammimah) karangan Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari, Qatrunnida karangan Imam Jamaluddin Abdullah bin Yusuf bin Hisyam al-

- Anshari, Taudhihul Masalik karangan K.H. Syukri Unus.
2. Sharaf. Kitab yang digunakan Matanul Bina wal Asas karangan Ibrahim bin Abdul Wahab, al-Kailani karangan Imam Rabbani Abul Hasan Ali bin Hisyam al-Kailani, Matan Maqsud, Lamiatul Af'al karangan Ibnul Malik, dan Silsil Madkhal.
 3. Balaghah. Kitab yang digunakan adalah Qawa'idul Lughatil Arabiyyah karangan Syekh Musthafa, Ilmu Balaghah, dan Ilmu Ma'ani karangan Syekh Jalaluddin as-Sayuthy.
 4. Manthiq. Kitab yang digunakan adalah Qaulul Mu'allaq karangan K.H. Syukri Unus, Idhahul Mubham karangan Syekh Ahmad Damhuri, Fi Ilmil Manthiq karangan Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
 5. Bahasa Arab (Muthalaah dan hiwar). Kitab yang digunakan adalah al-Qiraatur Rasyidah 1, 2, dan 3, Muhawaratul Haditsiyyah 1 dan 2.
 6. Insyah. Pelajaran ini dimaksudkan agar santri dapat mengarang tulisan dalam Bahasa Arab secara benar sesuai dengan qaidah Bahasa Arab. Kitab yang digunakan adalah Qiraatul Mufidah 1 dan 2 karangan

Ustadz Muhammad Qari, Lughatut Takhathub War Rasail karangan H. Fakhrurrazi.

Dari beberapa kitab yang diajarkan pada Madrasah Diniyah seperti yang disebutkan di atas diketahui bahwa selain kitab tersebut ditulis oleh tokoh-tokoh yang sudah mendunia seperti Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Sayuthy yang mengarang kitab Tafsir Jalalain serta banyak lagi tokoh lainnya, diketahui pula ada beberapa tokoh nasional dan tokoh lokal sebagai penulis. Tokoh nasional misalnya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi menulis kitab Maraqi al-Ubudiyyah (Akhlak), al-Arba'in an-Nawawi (Hadits), dan Tijan ad-Darari (Tauhid). Syekh Muhammad Yasin al-Fadani menulis kitab Fi Ilmil Manthiq (Manthiq). Sementara tokoh lokal Kalimantan Selatan misalnya K.H. Kasyful Anwar menulis beberapa kitab seperti kitab Risalatut Tauhid (Tauhid), Risalatul Fiqih (Fiqih), Durusut Tashrif 1, 2, 3, 4 (Sharaf). H. M. Syukri Unus menulis kitab Is'afut Thalibin (Nahwu), Taudhihul Masalik (Nahwu), dan Qaulul Mu'allaq (Manthiq). H.M. Sya'rani menulis Tanwirut Thullab (bidang Ushulul Hadits). H. Abdullah Jamal al-Banjary menulis kitab Risalah al-Ad'iyah wal Azkar.

Ditinjau dari sisi bahasa yang digunakan, sebagian besar kitab menggunakan Bahasa Arab, sebagiannya lagi

Bahasa Arab Melayu, dan sebagian kecil menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk Bahasa yang terakhir ini hanya digunakan di dalam kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Apakah Madrasah Diniyah mengajarkan mata pelajaran umum dan ketrampilan? Tidak semua Madrasah Diniyah mengajarkan kedua aspek ini, hanya sebagian kecil yang mengajarkannya. Misalnya Bahasa Inggris hanya diajarkan sebagai ekstra kurikuler di Madrasah Diniyah Majaligus Saniyah Marabahan karena di madrasah ini terdapat 1 orang guru yang berlatar belakang pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya adalah dalam bentuk tilawah/tartil, membaca puisi, maulid al-Habsyi, pembacaan Burdah, Kitab Dalailul Khairat, dan Aqidatul Awam. Kegiatan ekstra kurikuler ini terutama Tilawah dan membaca puisi lebih diintensifkan lagi jika akan menghadapi hari-hari besar Islam atau perlombaan-perlombaan seperti yang dilaksanakan oleh Forum Silaturrahmi Madrasah Diniyah (Porsadin) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Dalam buku Pengembangan Model Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliah disebutkan bahwa tujuan khusus kegiatan ekstra kurikuler adalah untuk menunjang pendidikan santri dalam mengembangkan bakat, minat,

kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan beragama, kemampuan belajar, wawasan, kemampuan memecahkan masalah, dan kemandirian. (Departemen Agama RI, 2015:59).

Ada sejumlah aktivitas yang dapat dilakukan santri seperti seni tilawah/qiraah, pembacaan tahlil, barjanji/dibaan, istighasyah, muhadharah/khitabah/latihan ceramah, forum debat, imla/dikte/menulis Arab, khat/seni kaligrafi, praktik perawatan jenazah, pembinaan dan pengembangan kesenian Islami, olah raga dan bela diri, dan pramuka santri.

Dengan demikian Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan dapat mempertimbangkan beberapa pilihan kegiatan ekstra kurikuler di atas untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketersediaan waktu dan sumber daya yang dimiliki.

BAB 9

PENUTUP

Kurikulum Madrasah Diniyah yang diterapkan dan dikembangkan di Kalimantan Selatan bervariasi dan tidak persis sama antara satu madrasah diniyah dengan madrasah diniyah lainnya. Pada dasarnya kurikulum yang ada dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan yang ditekankan oleh Kementerian Agama yang terdiri dari mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Tarikh, dan Bahasa Arab, 2) Mengadopsi kurikulum Kementerian Agama dengan tambahan mengambil esensi pengetahuan keislaman dari buku-buku keagamaan berbahasa Arab, dan sebagiannya dikembangkan dengan bahasa Arab Melayu, 3) Melaksanakan kurikulum sebagaimana kurikulum pondok pesantren sesuai dengan latar belakang pendidikan pesantren guru/pengelola Madrasah Diniyah.

Bagi pengelola Madrasah Diniyah perlu mengupayakan langkah-langkah pembenahan dan perbaikan terkait dengan rancangan kurikulum yang

diambil berdasar pada kitab-kitab turats yang dianggap representatif keagamaan, serta melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, tertulis dan sederhana, sehingga dapat dilaksanakan dalam pembelajaran dan mudah diserap oleh santri.

Mengingat Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting perannya dalam rangka menanamkan pendidikan keagamaan kepada para santri sejak usia dini, maka perlu adanya langkah-langkah perbaikan oleh para pendiri dan pengelolanya, juga dukungan nyata dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2018). Pemikiran tentang Pendidikan Pesantren, *Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 Nomor 2, 48-70.
- Agung Wibowo, RPS Kurikulum Pendidikan, <http://penbio.itsnupasuruan.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/RPS-KURIKULUM-PENDIDIKAN.pdf> diakses pada Desember 2021
- Ahmad, J., & Manusia, A. P. K. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*.
- Aisyah, S. (2015). *Perkembangan Kesiswaan dan Bimbingan Belajar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alia, Nur. (2015). Madrasah Diniyah Takmiliah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon. *Penamas*, 28(3), 445-462.
- Almasri, M. N. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam. *Kutubkhanah*, 19(2), 133-151.
- Amin, Headri. (2006). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.

- Arifin, H. M. (1991). *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aritonang, K. T. (2008). Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 11-21.
- Arwidayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar, (2017) *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan (PRODIRA)*, IKAPI Jabar: Widya Padjadjaran.
- Azhar M. Nur, Tugas Guru Sebagai Pengembang Kurikulum, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol XII No. 1, Agustus 2011
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.N. (1992), *Qualitatif Research for Education and Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon.
- Daulay, Haidar Putra. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.

- Departemen Agama, R.I (2003). *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdiknas. (2000). *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamalik, Oemar. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husnul Yaqin, Norlaila, dan Ahmad Zakki Mubarak. (2011). Profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin. Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 14-32.
- Indah Maharani, Hade Afriansyah. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Judul Artikel, Padang 2019.
- Iskandar, I. (2012). *Dakwah dan Individualisme, Materialisme dan Hedonisme*. *Jurnal Tabligh*, 13(1), 17-30.
- Kementerian Agama RI (2015), *Pengembangan Model Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliah*,

- (Jakarta: Dirjen Pendis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren).
- Kementerian Agama RI (2015), *Standar Nasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam Standar Isi dan Kompetensi Lulusan*, (Jakarta: Dirjen Pendis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren).
- Majid, Abdul (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maya, R. (2017). Esensi Guru dalam Visi-Misi Pendidikan Karakter. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Muhammad Nasir, Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah, *Jurnal Penelitian* Vol. 10 No.2 Oktober 2009.
- Nata, Abuddin (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nazir, Moh. (2011). *Metedologi Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).

Noni Mardita, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran,

<https://osf.io/pa4r5/download/?format=pdf>

diakses pada Desember 2021

Peraturan Menteri Agama No. 03 tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964 tentang Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Madrasah Diniyah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Ria Sita Ariska, Manajemen Kesiswaan, Jurnal Manajer Pendidikan, Vol. 9 No. 6, November 2015.

Rochanah, 2016, Peranan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Menunjang Pembelajaran yang Efektif, Jurnal Elementary, Vol 4 No. 1 Januari-Juni.2016

- Rosyadi, A. R., Mujahidin, E., & Muchtar, A. (2013). Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awwaliyah di Kabupaten Pandeglang. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-16.
- Sakti, B. P. (2016). Etika dan Profesi Guru SD Di Tengah Perkembangan Zaman. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar Proceeding PGSD Universitas Kuningan 2016*, 1(1), 99-107. <https://proceeding.uniku.ac.id/index.php/pgsd2016/article/view/10>
- Saragih, A. H. (2008). Kompetensi Minimal Seorang Guru Dalam Mengajar. *Jurnal Tabularasa*, 5(1), 23-34.
- Smith, G. A., & Sobel, D. (2014). *Place-and Community-Based Education in Schools*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Sobel, D. (2004). *Place-Based Education: Connecting Classroom and Communities*, Barrington, Orion Society.
- Solichin, M. M. (2006). Belajar dan Mengajar Dalam Pandangan Al-Ghazâlî. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).

- Solihin, I. (2018). Madrasah dan Pertumbuhan Keilmuan Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 97- 106.
- Tamuri, A. H., Ismail, M. F., & Jasmi, K. A. (2012). Komponen Asas untuk Latihan Guru Pendidikan Islam [Basic Components for Islamic Education Teacher Training]. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(2), 53-63.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen FT UIN Maulana Malik Ibrahim. (2011). *Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press.
- Umar, M. (2016). Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 18-29.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. In *Prosiding Seminar Nasional*

Pendidikan Matematika (Vol. 1, No. 26, pp. 263-278).

Yudi Candra Hermawan, Wikanti Iffah Julian, Hendro Widodo, Konsep Kurikulum dan Kurikulum Pendidikan Islam, Jurnal MUDARRISUNA, Vol 10, No. 1 Januari-Maret 2020.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. lahir di Desa Rumpiang Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Maret 1966. Menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada Pondok Pesantren Abnaul

Amin Rumpiang dan tamat tahun 1979. Kemudian melanjutkan sekolah ke Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur sampai tahun 1982, dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Banjarmasin sampai tahun 1985. Pendidikan tinggi ia selesaikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1989 untuk jenjang S.1 (Strata Satu). Untuk jenjang S.2 di Curtin University of Technology Perth Australia tahun 1993, dan program Doktor (S.3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

Sedangkan jabatan yang pernah diduduki antara lain adalah Kepala Seksi Laboratorium Bahasa pada Unit Pelayanan Bahasa IAIN Antasari (1997),

Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari (1998-2002), Anggota Senat IAIN Antasari (2006-2007), Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam (PUSJIBANG-PI) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari (2008-2011), Asisten Direktur Pascasarjana IAIN Antasari (2009 – 2013), Ketua Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Antasari (2014-2017), dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Antasari (2017 – 2021).

Selain aktif mengajar di perguruan tinggi, penulis juga banyak terlibat sebagai nara sumber dalam kegiatan seminar, workshop, serta pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan, baik guru, kepala sekolah, pengawas, pimpinan pesantren, dan lain sebagainya.

Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain Manajemen Sekolah Yang Efektif (Buku Terjemahan, IAIN Antasari, 2001), Manajemen Sekolah Pendekatan TIM (Buku Terjemahan, IAIN Antasari, 2002), An Induction Programme for Beginning Teacher (buku, Penerbit Yapma Press Makasar, 2004), Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan (Buku, Antasari Press, 2009), Kapita Selekta Administrasi dan

Manajemen Pendidikan (Buku, Antasari Press, 2011).
Peta Kajian Disertasi Pendidikan Agama Islam
(Penelitian, Pascasarja IAIN Antasari, 2015).
Selengkapnya karya penulis juga diterbitkan di beberapa
jurnal seperti Jurnal Ilmiah “Khazanah” IAIN Antasari,
Jurnal Ilmiah “Tarbiyah” Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari, Jurnal Ilmiah “Al Hadharah” Fakultas Dakwah
IAIN Antasari, Jurnal Ilmiah “Edukasi” Puslitbang
Departemen Agama RI Jakarta, Jurnal ilmiah “Socio-
Religia” Yogyakarta, Jurnal internasional “Civilization”
Malaysia, dan Internasional Journal of Indonesia Islam
(JIS).

Sekarang penulis aktif mengajar pada Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan serta di Pascasarjana UIN
Antasari Banjarmasin. Tinggal di Jl. Bumi Mas Raya
Komplek Bumi Handayani III RT. 30 No. 16
Banjarmasin Kalimantan Selatan, E-mail:
husnulyaqin@uin-antasari.ac.id